**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister (S2) dalam bidang Akhwal Syaksiyah

**TESIS**

**OLEH**

**FAHRI FIJRIN KAMARU**

**NIM. 21211012**



**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKSIYAH**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

**TAHUN 2023**

# D:\User\Downloads\WhatsApp Image 2023-07-12 edit.jpegPENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Minahasa Selatan” yang ditulis oleh Fahri Fijrin Kamaru, NIM. 21211012 Mahasiswa PPs IAIN Manado Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah telah dinyatakan **LULUS** ujian tesis yang diselenggarakan pada hari …. …… 2023 M. bertepatan dengan ………. 1445 H. dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran dari tim penguji pada ujian tersebut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | TIM PENGUJI | TANGGAL | TANDA TANGAN |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Manado, …………….. 2023 M

………….1445 H

Diketahui oleh

Direktur PPs IAIN Manado

Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag.

# D:\User\Downloads\PALGIARISME.jpegPERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRI FIJRIN KAMARU

NIM : 21211012

No. Hp. : 085240089983

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Minahasa Selatan” adalah hasil karya saya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan seumber pengambilannya. Apabila dikemudian hari terdapat hasil plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan yang berlaku.

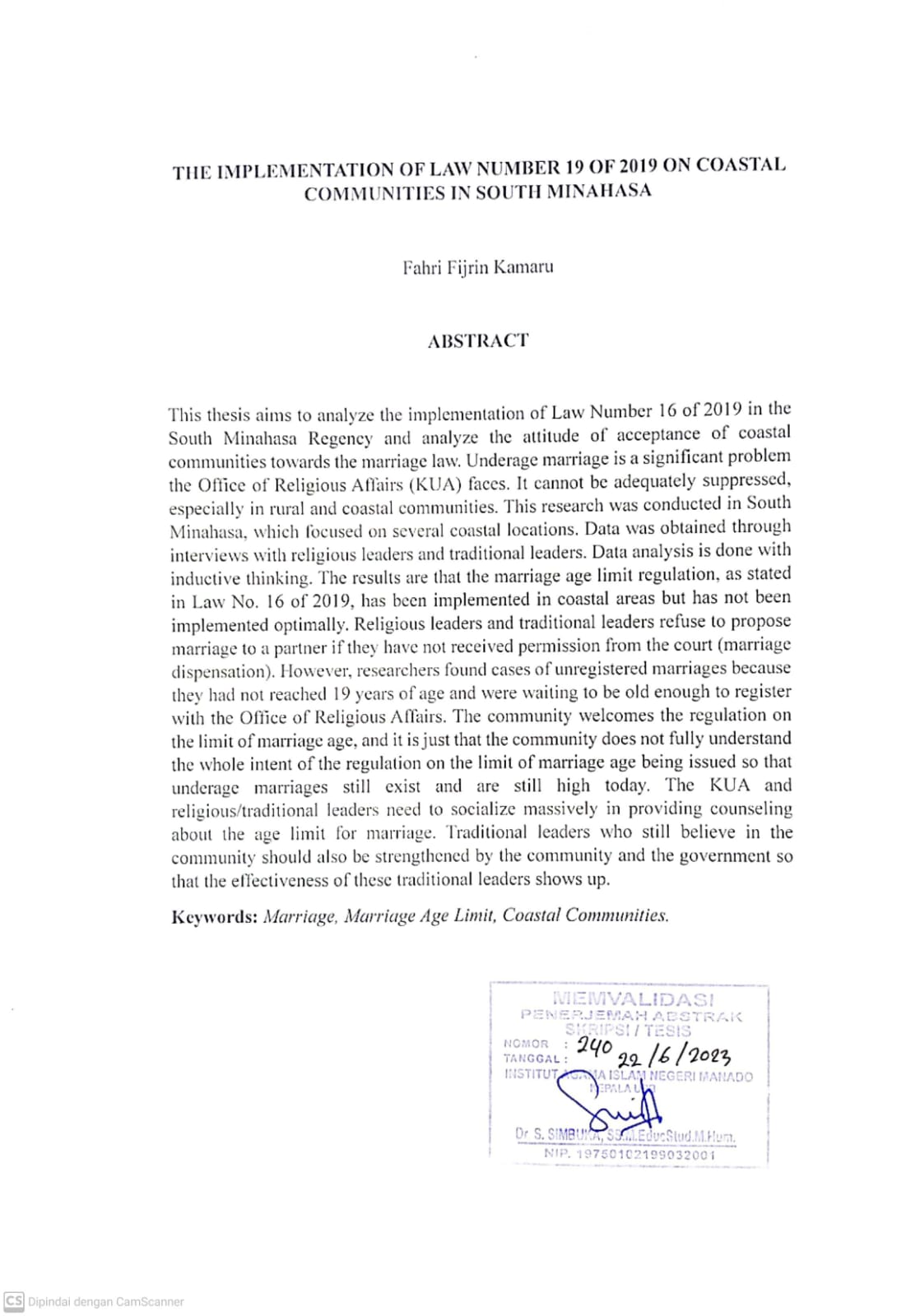
Manado, Juni 2023

Yang menyatakan

Fahri Fijrin Kamaru

**IMPLEMENTATION OF LAW NO. 16 OF 2019 CONCERNING COASTAL COMMUNITIES OF SOUTH MINAHASA REGENCY**

Fahri Fijrin Kamaru



# ABSTRACT

This thesis aims to analyze the implementation of Law Number 16 of 2019 in South Minahasa Regency and analyze the attitude of acceptance of coastal communities towards the marriage law. Underage marriage is a major problem faced by the Office of Religious Affairs (KUA). Until now it still can't be suppressed properly, especially in rural and coastal communities. This research was conducted in South Minahasa which focused on several coastal locations. Data were obtained through interviews with religious leaders and traditional leaders. Data analysis is done with inductive thinking. The results obtained are that the marriage age limit regulation as stated in Law No. 16 of 2019 has been implemented in coastal areas but has not been implemented optimally. Religious leaders as well as traditional leaders refuse to propose a marriage to a partner if they have not received permission from the court (marriage dispensation). However, researchers found cases of unregistered marriages because they had not reached 19 years of age and were waiting to be old enough to register with the Office of Religious Affairs. Basically, the community welcomes the regulation on the limit of marriage age, it's just that the community does not fully understand the whole intent of the regulation on the limit of marriage age being issued so that underage marriages still exist and are high to this day. Massive outreach by the KUA and religious/traditional leaders is needed in providing counseling on the age limit for marriage. Traditional leaders who are still trusted by the community should also be strengthened both from the community and the government so that the effectiveness of these traditional leaders can be seen.

**Keywords:** marriage, age limit for marriage, coastal communities.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Fahri Fijrin Kamaru

# ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan dan menganalisis sikap penerimaan masyarakat pesisir terhadap undang-undang perkawinan tersebut. Pernikahan di bawah umur menjadi masalah utama yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA). Sampai sekarang masih belum bisa ditekan dengan baik khususnya pada masyarakat desa dan pesisir. Penelitian ini dilakukan di Minahasa Selatan yang berfokus pada beberapa lokasi pesisir. Data didapatkan melalui wawancara kepada tokoh agama dan tokoh adat. Analisis data dilakukan dengan pemikiran induktif. Hasil yang didapatkan adalah aturan batas usia nikah sebagaimana tertuang pada UU No 16 tahun 2019 telah dijalankan di wilayah pesisir namun belum terlaksana secara maksimal. Para tokoh agama dan juga tokoh adat menolak pengajuan pernikahan pada pasangan apabila belum mendapatkan izin dari pengadilan (dispensasi nikah). Namun peneliti menemukan kasus pernikahan yang dilakukan secara siri karena belum mencapai 19 tahun dan menunggu cukup umur untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama. Pada dasarnya masyarakat menyambut dengan baik regulasi batas usia nikah, hanya saja masyarakat tidak memahami secara menyeluruh keseluruhan maksud regulasi batas usia nikah ini diterbitkan sehingga tetap saja pernikahan di bawah umur ini masih ada dan tinggi sampai dengan sekarang. Perlu sosialisasi secara massif pihak KUA dan tokoh agama/adat dalam memberikan penyuluhan batas usia nikah ini. Tokoh adat yang masih percaya masyarakat harusnya juga diperkuat baik dari masyarakat maupun pemerintah agar lebih terlihat efektifitas dari tokoh adat tersebut.

**Kata Kunci**: pernikahan, batas usia nikah, masyarakat pesisir.

# KATA PENGANTAR

****

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini yang berjudul “**Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Minahasa Selatan**” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum, konsentrasi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Delmus Puneri Salim, MA, M.Res Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, para wakil Rektor I,II dan III, serta seluruh Staf IAIN Manado yang telah memberikan pelayanan maksimal kepada penulis.
2. Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, sekaligus penguji tesis, diucapkan terima kasih atas ilmu, masukan kritikan dan saranya.
3. Dr. Evra Wilya, MA. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, sekaligus sekretaris penguji diucapkan terima kasih atas ilmunya, masukkan kritikan dan sarannya.
4. Dr. Drs. Naskur, M.HI., dan Dr. Muliadi Nur, M.H, selaku pembimbing I dan Pembimbing II terima kasih atas bimbingannya yang dapat memperluas wawasan keilmuan penulis.
5. Para Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dengan segala jerih payah dan ketulusan, membimbing dan memandu perkuliahan, sehingga memperluas wawasan keilmuan penulis.
6. Kepala Perpustakaan Pusat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian tesis ini.
7. Para Staf Akademik di lingkungan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Hi. Burhanuddin Kamaru dan Ibunda Hj. Hapsa Dailer, ananda haturkan penghargaan teristimewa serta ucapan terima kasih yang tulus, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan mengasuh, membimbing, dan mendidik, dan memotivasi disertai doa yang tulus kepada penulis. Juga kepada Istri saya Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum dan juga Ananda tercinta Naylah Salsabilah Kamaru yang selalu memberikan dukungan Moril dan spiritual, setia mendampingi dari awal perkuliahan sampai pada proses penelitian berlangsung, serta Kakak-kakak saya Muhimmah Rodiah Kamaru, S.Pd dan Mukmina Rohaimy Kamaru, S.Pd yang dan sahabat, teman, seseorang yang penulis cintai serta keluarga besar saya yang ada di Desa Sapa Timur, yang sudah memberikan do’a kasih sayang, motivasi selama penulis melaksanakan studi.
9. Keluarga besar Kamaru-Camaru yang ada di Gorontalo, Paleleh, Palu, Minahasa Selatan dan seluruh kelurga di Daerah lainnya yang memberikan dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa (i) Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran, dan kerjasama selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Akhirnya, dengan lapang dada penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Kepada Allah swt. Penulis panjatkan doa, semoga bantuan dan ketulusan yang telah diberikan, senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah swt, dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin.

Manado, Juni 2023

Fahri Fijrin Kamaru

NIM. 21211012

# DAFTAR ISI

**COVER**

[PENGESAHAN PENGUJI ii](#_Toc137726109)

[PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii](#_Toc137726110)

[ABSTRACT iv](#_Toc137726111)

[ABSTRAK v](#_Toc137726112)

[KATA PENGANTAR vi](#_Toc137726113)

[DAFTAR ISI ix](#_Toc137726114)

[PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN xi](#_Toc137726115)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc137726117)

[A.Latar Belakang Masalah 1](#_Toc137726118)

[B. Batasan Masalah 7](#_Toc137726119)

[C. Rumusan Masalah 7](#_Toc137726120)

[D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8](#_Toc137726121)

[E. Definisi Operasional 9](#_Toc137726122)

[F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 10](#_Toc137726123)

[BAB II](#_Toc137726124) [LANDASAN TEORI 16](#_Toc137726125)

[A. Pernikahan 16](#_Toc137726126)

[B. Pernikahan Dini 25](#_Toc137726127)

[C. Faktor dan Dampak Pernikahan Dini 35](#_Toc137726128)

[D. Hukum Islam tentang Pernikahan Dini 39](#_Toc137726129)

[D. Aturan Batas Usia Nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 41](#_Toc137726130)

[E. Masyarakat Pesisir 48](#_Toc137726131)

[F. Dispensasi Nikah 50](#_Toc137726132)

[G. Aturan Dispensasi Nikah berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019 59](#_Toc137726133)

[BAB III](#_Toc137726134) [METODE PENELITIAN 69](#_Toc137726135)

[A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 69](#_Toc137726136)

[B. Lokasi Penelitian 70](#_Toc137726137)

[C. Sumber Data 70](#_Toc137726138)

[D. Teknik Pengumpulan Data 71](#_Toc137726139)

[E. Teknik Analisis Data 73](#_Toc137726140)

[BAB IV](#_Toc137726141) [HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75](#_Toc137726142)

[A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 75](#_Toc137726143)

[B. Hasil Penelitian 77](#_Toc137726144)

[C. Pembahasan **84**](#_Toc137726145)

[1. Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 pada Masyarakat Pesisir 84](#_Toc137726146)

[2. Sikap Masyarakat Pesisir terhadap UU No. 16 Tahun 2019 89](#_Toc137726147)

[BAB V](#_Toc137726148) [PENUTUP 99](#_Toc137726149)

[A. Kesimpulan 99](#_Toc137726150)

[B. Saran 100](#_Toc137726151)

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN

1. **Pedoman Transliterasi**

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan dengan alih aksara ini penting diberikan.

Pengetahuan tentang ketentuan alih aksara ini seyogyanya diketahui dan dipahami, tidak saja oleh mahasiswa yang akan menulis karya tulis, melainkan juga oleh dosen, khususnya dosen pembimbing dan dosen penguji, agar terjadi saling kontrol dalam penerapan dan konsistensinya.

Dalam dunia akademis, terdapat beberapa versi pedoman alih aksara, antara lain versi Turabian, Library of Congress, Pedoman dari Kementerian Agama dan Diknas RI, serta versi Paramadina. Umumnya, kecuali versi Paramadina, pedoman alih aksara tersebut meniscayakan digunakannya jenis huruf (font) tertentu, seperti font Transliterasi, Times New Roman, atau Times New Arabic.

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tesis ini, pedoman alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi di atas, melainkan dengan mengkombinasikan dan memodiﬁkasi beberapa ciri hurufnya. Kendati demikian, alih aksara versi Pascasarjana ini disusun dengan logika yang sama.

1. **Padanan Aksara**

Berikut ini adalah daftar aksara arab dan padananya dalam aksara latin:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HURUF ARAB** | **HURUF LATIN** | **KETERANGAN** |
| ا |  | Tidak dilambangkan |
| ب | b | Be |
| ت | t | Te |
| ث | ts | te dan es |
| ج | j | Je |
| ح | h | ha dengan garis bawah |
| خ | kh | ka dan ha |
| د | d | de |
| ذ | dz | de dan zet |
| ر | r | er |
| ز | z | zet |
| س | s | es |
| ش | sy | es dan ye |
| ص | sh | es dengan ha |
| ض | dh | de dengan ha |
| ط | th | te dengan ha |
| ظ | zh | zet dengan ha |
| ع | ‘ | koma terbalik di atas hadap kanan |
| غ | gh | ge dan ha |
| ف | f | ef |
| ق | q | qi |
| ك | k | ka |
| ل | l | el |
| م | m | em |
| ن | n | en |
| و | w | we |
| ھ | h | ha |
| ء | ` | apostrof |
| ي | y | ye |

1. **Vocal**

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TANDA VOKAL ARAB** | **TANDA VOKAL LATIN** | **KETERANGAN** |
| **ﹷ** | a | *fathah* |
| *ﹻ* | i | *kasrah* |
| *ﹹ* | u | *dammah* |

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TANDA VOKAL ARAB** | **TANDA VOKAL LATIN** | **KETERANGAN** |
| **ﹷ** ي | ai | a dan i |
| **ﹷ** و | au | a dan u |

1. **Vocal Panjang**

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TANDA VOKAL ARAB** | **TANDA VOKAL LATIN** | **KETERANGAN** |
| **يا** | â | a dengan topi di atas |
| **ﺌﻲ** | î | i dengan topi di atas |
| **ﺌﻮ** | û | u dengan topi di atas |

1. **Kata Sandang**

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, ﺍل yaitu, dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

1. ***Syaddah (Tasyddid)***

Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ( ّ ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya, kata الضرورۃ tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

1. ***Tamarbutah***

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûtah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûtah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KATA ARAB** | **ALIH AKSARA** |
| 1 | طريقة | Tharîqah |
| 2 | الجا معة الإ سلا مية | al-jâmi‘ah al-islâmiyyah |
| 3 | وحدةالوجود | wahdat al-wujûd |

1. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi).

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. Demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Dîn al-Raniri.

1. **Cara Penulisan Kata**

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kata Arab** | **Alih Aksara** |
| ﺫھب الاستاﺫ | Dzahaba al-ustâdzu |
| ثبت الاجر | Tsabata al-ajru |
| الحركة العصرية | Al-harakah al-‘ashriyyah |
| موﻻنا ملك الصالح | Maulânâ Malik al-Shâlih |
| يؤﺛركم الله | Yu’tsirukum Allâh |
| الايات الكو نية | Al-âyât al-kauniyyah |

1. **Daftar Singkat/Istilah**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subhânahu wa ta‘âlâ

saw. = shallallâhu ‘alaihi wa sallam

as. = ‘alaihi al-salâm

ra. = radhiyallâhu ‘anhu

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS. …/…:4 = Quran, Surah …, ayat 4

HR. = Hadits Riwayat

Alm = Almarhum/Almarhumah

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mana pasti ada akibat hukum.[[1]](#footnote-1) Akibat hukum yang dimaksud ialah sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, apabila suatu perkawinan itu tidak sah di mata hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan jika terjadi perceraian maka tidak dapat menuntut hak apapun karena tidak berkekuatan hukum.[[2]](#footnote-2) Untuk itu agar perkawinan sah secara hukum dan agama harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian Zulfani[[3]](#footnote-3) Di Indonesia sudah ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974, diantaranya terdapat persyaratan perkawinan salah satunya adalah batas usia minimal melakukan perkawinan namun aturan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019 berubah menjadi UU No. 16 tahun 2019 yang fokus perubahannya adalah pada usia pasangan menikah.

Hal yang mendorong diubahnya UU Perkawinan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat pernikahan anak. Data penelitian UNICEF tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-7 dari Negara di dunia yang memiliki tingkat perkawinan dini tertinggi dan peringkat ke-2 se-ASEAN setelah Kamboja.[[4]](#footnote-4) Kenyataan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan generasi muda terutama bagi tumbuh kembang mereka serta menghilangkan hakhak dasar yang seharusnya mereka peroleh seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak sipil, hak terbebas dari diskriminasi dan kekerasan serta hak-hak yang lain.[[5]](#footnote-5) Negara harus mampu menjamin upaya perlindungan anak dari praktek perkawinan di bawah umur. Padahal secara Ius Constitutum, sebenarnya pemerintah melalui UU Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban dalam pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahkan ketentuan batas usia perkawinan 16 tahun tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kategori anak sebagai sesorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan. Namun prakteknya, lembaga perkawinan justru terkesan membuka peluang legalisasi terhadap terjadinya perkawinan ini dengan adanya Pasal 7 undang-undang perkawinan yang akhirnya memantik beberapa korban perkawinan dini untuk mengajukan uji materi terhadap pasal tersebut kepada MK dan lahirlah revisi terhadap undang-undang perkawinan tersebut.[[6]](#footnote-6)

UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa ‘perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun’. Berubahnya bunyi pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masif dilakukan. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, pernikahan dini masih pada angka yang sama bahkan mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan usia nikah yang berubah membuat usia yang seharusnya bisa menikah sesuai dengan aturan yang lama menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Kenaikan batas usia minimal perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 dari 16 tahun menjadi 19 tahun menimbulkan beragam implikasi terhadap hukum keluarga, mulai pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang meningkat dan perceraian dini.[[7]](#footnote-7) Tentu hal tersebut menjadi masalah yang harus diperhatikan.

Pemerintah merevisi ketentuan batas usia nikah dengan menerbitkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tetang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pertimbangan kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.[[8]](#footnote-8)

Pembentukan batas umur nikah oleh undang-undang dengan maksud agar terjadi kemaslahatan bagi keluarga dan rumah tangga. Batasan umur ditentukan oleh undang-undang, dengan memperhatikan tujuan perkawinan menurut ayat 1 undang-undang, yaitu tercapainya keseimbangan dalam membangun rumah tangga yang tetap yang memuaskan atas dasar Tuhan Yang Maha Esa. Ini bertepatan dengan era di mana masyarakat menjadi lebih dan lebih kompleks. Menurunnya nilai moral dan moral remaja yang terjerumus pada kejadian pacaran dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah.

Salah satu celah hukum terjadinya perkawinan di bawah umur di masyarakat adalah ruang DK dan adanya persetujuan dari pejabat lain sebagaimana diatur dalam UUP.[[9]](#footnote-9) Salah satu alasan penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) mengapa tidak melibatkan PA dalam hal pemberian izin DK karena pengurusan serta administratif yang berbelit-belit, memakan waktu yang realtif lama dan ada kemungkinan untuk ditolak. Sementara sebagian yang akan melakukan perkawinan itu sudah hamil terlebih dahulu. Tujuan utama dari penghulu di KUA agar mempermudah proses perkawinan dan menjaga agar tidak terjadi perzinahan kembali.

Pernikahan di bawah umur sudah menjadi hal yang biasa di masa kini, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan di bawah umur yang sudah menjadi isu nasional selama bertahun-tahun. Di tahun 2018, sebanyak 11, 21 persen perempuan yang berumur 20 sampai 24 tahun telah melakukan perkawinan sebelum mereka berumur 18 tahun. Di 20 provinsi dari 34 provinsi, proporsi perkawinan di bawah umur masih berada di atas angka rata-rata nasional. Provinsi dengan proporsi perkawinan di bawah umur tertinggi adalah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Terdapat lebih dari 1 (satu) juta anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur. Angka absolut kasus perkawinan di bawah umur yang paling tinggi adalah provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Dalam satu dekade, proporsi perkawinan di bawah umur di daerah pedesaan mengalami penurunan sebanyak 5,76 persen, sementara proporsi di daerah perkotaan mengalami penurunan yang jauh lebih sedikit yaitu kurang dari 1 persen.[[10]](#footnote-10)

Upaya pencegahan bahkan penghapusan sudah dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi dampak pekawinan di bawah umur bahkan sampai pada perubahan aturan tentang batas usia untuk melakukan perkawinan pun pemerintah telah lakukan. Perkawinan di bawah ini bisa saja menjadi tradisi bagi masyarakat jika tidak ditemukan akar penyebabnya.

Beberapa faktor menjadi pemicu adanya perkawinan di bawah umur. Diantara faktor tersebut adalah sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini melatarbelakangi PBB pada akhir tahun 2014 merekomendasikan target khusus dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pasca 2015, untuk menghapus perkawinan di bawah umur. Rekomendasi tersebut didukung 116 negara anggota PBB, termasuk Indonesia.[[11]](#footnote-11)

Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 melaporkan bahwa diantara perempuan yang pernah menikah di usia 20 sampai dengan 24 tahun, 25% menikah sebelum usia 18 tahun menurut hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional pada tahun 2012. Artinya, 1/6 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa. Data menunjukkan bahwa 340.000 anak perempuan setiap tahunnya telah melakukan perkawinan di bawah umur. Proporsi perkawinan di bawah umur di Indonesia bukan hanya tetap tinggi tetapi kembali meningkat.[[12]](#footnote-12)

Laporan yang diperbaharui pada tahun 2020 oleh BPS dan UNICEF juga menunjukkan data yang tidak jauh berbeda yaitu pada tahun 2018 di Indonesia, 1 (satu) dari 9 (sembilan) anak perempuan berumur 20 sampai 24 tahun telah menikah sebelum umur 18 tahun dan lazim disebut dengan perkawinan di bawah umur atau pernikahan anak.[[13]](#footnote-13)

Diperkirakan anak perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur mencapai angka 1.220.900 kasus. Angka yang tinggi ini, menyebabkan Indonesia berada pada kategori 10 (sepuluh) negara dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi di dunia. Dalam kurun waktu satu dekade, hanya terdapat penurunan kecil angka perkawinan di bawah umur di Indonesia yaitu sebanyak 3,5 persen.[[14]](#footnote-14)

Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Minahasa Selatan termasuk pernikahan yang paling banyak terjadi pada masa sekarang ini. Melihat pada data dari PA Amurang ditemukan bahwa pada tahun 2022 tercatatn ada sekitar 25 permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan dan 23 permohonan pada tahun 2021. Selain itu, data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, memaparkan jika pernikahan dini untuk wilayah kabupaten di Sulawesi Utara berada di kisaran 19,43 persen dan di pedesaan jauh lebih tinggi mencapai 32,24 persen.[[15]](#footnote-15) Hal ini berarti regulasi yang dibuat oleh pemerintah ini masih belum bisa dikatakan terimplementasi dengan baik di masyarakat, artinya bisa dibilang belum efektif apakah itu dari segi regulasinya atau dari segi implementasinya. Berbicara masyarakat pesisir, wilayah pesisir dengan masyarakat Muslim terbesar adalah Tanamon, Sapa Timur, Ongkaw dan Boyong Pante, Molinow, Tumpaan, Bajo dan Arakan. Meskipun begitu, masyarakat di wilayah tersebut tetap memiliki aktivitas sosial dengan agama yang lain.

Faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur terjadi di Minahasa selatan adalah hamil da nada beberapa faktor. Namun, perlu disadari bahwa pernikahan di bawah umur dilakukan secara cepat oleh masyarakat mengakibatkan ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga apalagi hubungan tersebut berkaitan dengan cara mereka bersosial di masyarakat. Artinya pernikahan di bawah umur tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sosial masyarakat bagi pasangan khususnya masayrakat muslim yang sering melaksanakan pernikahan di bawah umur. Maka dalam hal ini peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul ‘Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Masyarakat Pesisir Kabupaten Minahasa Selatan.’

## B. Batasan Masalah

1. Penelitian ini berfokus pada masyarakat Muslim pesisir.
2. Penelitian ini memfokuskan pada perkawinan di bawah umur.
3. Tujuan penelitian ini selain mengkaji fenomena perkawinan di bawah umur juga melihat kehidupan sosial kemasyarakatan masyarakat Muslim pesisir atas perkawinan di bawah umur.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah digambarkan, peneliti setidaknya menyajikan rumusan masalah yang akan menjawab inti permasalahan tersebut, antara lain:

1. Bagaimana implementasi UU No. 16 tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan?
2. Bagaimana sikap penerimaan masyarakat muslim pesisir di Kabupaten Minahasa Selatan terhadap UU No. 16 tahun 2019?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

* + - 1. Menunjukan studi hasil analisa terhadap implementasi UU No. 16 tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan.
      2. Menunjukan pengaruh pernikahan di bawah umur masyarakat muslim pesisir di Kabupaten Minahasa Selatan terhadap kehidupan sosial masayarakat.

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini antara lain:

* + 1. Secara teoritis:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan pemerintah dan bahan penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa.
2. Penelitian ini menjadi sumbangsi penambahan literasi wawasan keilmuan perihal masalah pernikahan yang dalam hal ini difokuskan pada batasan usia nikah dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga jurusan Ahwal al Syakhsiyyah di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado.
   * 1. Secara praktis:
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister S2 dalam Program Studi Ahwal al Syakhsiyah di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado.
4. Penelitian ini mampu menjawab problema yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat menikahkan anak mereka sebelum mencapai aturan yang ditetapkan undang-undang.

## E. Definisi Operasional

UU No. 16 tahun 2019 adalah perubahan dari UU No. 1 tahun 1974. Regulasi ini hanya merubah syarat usia pasangan untuk menikah yakni pada pasal 7 ayat 1.[[16]](#footnote-16) Aturan ini mewajibkan pasangan baik laki-laki dan juga perempuan minimal adalah 19 tahun.[[17]](#footnote-17) Usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019  atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan maslahat yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan. Hal ini patut diapresiasi dikarenakan perjuangan untuk merevisi undang-undang no 1 tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 19 tahun bagi pihak laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan perempuan 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Jika ditinjau dengan menggunakan teori maslahah mursalah, setidaknya berhubungan dengan empat unsur pokok yang dilindungi agama, sebagai tujuan awal pensyari’atan hukum. Keempat unsur pokok adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam keluarga. Persoalan batas minimal usia untuk menikah ini merupakan wilayah ijtihadiyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut.

Perihal pernikahan dini banyak sekali dibahas oleh pemikir Islam. Jika dilihat pada regulasi aturan pernikahan yakni UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1, pasangan dikatakan menikah dini jika usia pasangan adalah di bawah 19 tahun. Namun UUP ini bukan menjadi satu-satunya aturan yang dijadikan syarat pasangan menikah, yang menjadi dasar lain adalah agama Islam. Dari segi agama Islam tidak ada syarat usia bagi pasangan menikah asalkan pasangan tersebut sudah baliqh, baliqh di sini didefinisikan sebagai tanda menstruasi bagi perempuan dan ‘mimpi’ bagi laki-laki.[[18]](#footnote-18) Namun biasanya masyarakat membatasi usia menikah yakni 16 tahun perempuan dan 17 tahun bagi laki-laki.[[19]](#footnote-19)

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti setidaknya menemukan kemiripan tesis ini dengan beberapa penelitian yang lain, namun ada perbedaan yang bisa ditunjukan. *Pertama*, Ihya' Tsimaar Ariih[[20]](#footnote-20) dengan judul ‘Studi Komparasi Batas Usia Perkawinan Antara Hukum Indonesia (UU 16 Tahun 2019 Perubahan UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan Hukum Sarawak’. Hasil pada penelitian ini adalah pembatasan usia perkawinan Indonesia dan Sarawak memiliki tiga persamaan yakni tidak bertentangan dengan hukum Islam, memiliki unsur mutlak pria dan wanita serta mengandung asas kedewasaan. Perbedaan ketentuan undang-undang tersebut terkait latar belakang dan konsep pembatasan usia laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan penelitian ini yang menekankan pada perbandingan efektivitas pada kedua aturan pernikahan tersebut dan menunjukan solusi yang sesuai untuk menekan angka perceraian.

*Kedua*, Valeriel Margarettha Susanto[[21]](#footnote-21) dengan judul ‘Efektifiras Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)’. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang pertama, mengenai faktor faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ialah 1. faktor hamil diluar nikah, 2. faktor ekonomi, 3. faktor pendidikan. Yang kedua, efektifitas (pasal 7) mengenai batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan. Peneliti melihat penelitian ini lebih fokus kepada jalannya UU No. 16 Tahun 2019, peneliti menganggap bahwa untuk melihat kembali efektif tidaknya aturan ini perlu untuk dilakukan perbandingan setelah itu ditunjukkan titik persoalan dan menjawab solusi yang konkrit untuk menekan angka pernikahan dini ini.

*Ketiga*, Taufik Hidayat Sahrudin[[22]](#footnote-22) dengan judul ‘Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)’. Penelitian ini memfokuskan dampak yang terjadi akibat berlakunya UU No. 16 tahun 2019 terhadap keabsahan sebuah perkawinan yang dilihat dari dua aspek (Hukum Islam dan Hukum Positif). Pada tesis ini, peneliti menjelaskan lebih eksplisit penerapan UU No. 16 tahun 2019 mulai dari implementasi aturan tersebut sampai pada titik permasalahan yang harusnya menjadi pusat perhatian.

*Keempat*, Rafida Ramelan[[23]](#footnote-23) dengan judul ‘Batas usia minimal perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan implikasinya terhadap dispensasi kawin: Studi atas pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta’. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan batas usia minimal perkawinan menurut fiqh tidak diatur secara eksplisit. Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dibatasi antara 16-23 tahun dengan mengedepankan aspek kedewasaan secara fisik dan psikis. Legislasi pembentukan UU No. 16 tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor niat/kehendak penguasa, serta telah berlandaskan pada kemaslahatan umum. Kemudian pandangan hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta dalam menafsirkan UU No.16 tahun 2019 dinilai baik secara penafsiran gramatikal, otentik dan analogis.

*Kelima*, Mughniatul Ilma[[24]](#footnote-24) dengan judul ‘Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019’. Hasil penelitian ini adalah praktek perkawinan di bawah umur pasca revisi UU Perkawinan akan terus menerus terjadi jika aturan yang ada tidak melimitisasi alasan di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin. Perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.

*Keenam,* Iwan Sitorus,[[25]](#footnote-25) usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan maslahat yang begitu besar di mana yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki telah berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan. Hal ini patut diapresiasi dikarenakan perjuangan untuk merevisi undang-undang no 1 tahun 1974 telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan usia yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi 19 tahun bagi pihak laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan perempuan 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Jika ditinjau dengan menggunakan teori maslahah mursalah, setidaknya berhubungan dengan empat unsur pokok yang dilindungi agama, sebagai tujuan awal pensyari’atan hukum. Keempat unsur pokok adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam keluarga. Persoalan batas minimal usia untuk menikah ini merupakan wilayah ijtihadiyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut.

*Ketujuh*, Amri & Khalid,[[26]](#footnote-26) kepastian dan ketegasan hukum harus ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Karena tanpa adanya kepastian hukum maka hak-hak subyek hukum akan terampas dan terabaikan. Begitu pula tanpa ketegasan dalam hukum akan membuat subjek hukum merasa khawatir dan tidak aman karena merasa hukum tidak memberikan perlindungan bagi dirinya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai belum memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia perkawinan dalam undang-undang ini hanya mempertimbangkan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus melihat berbagai aspek hukum lainnya dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas, sehingga diperlukan revisi undang-undang ini secara menyeluruh. Bahkan jika memungkinkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan disesuaikan dengan permasalahan hukum saat ini dan yang akan datang. Dengan menerapkan konsep kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.

*Kedelapan*, Nurhalisa membahas bahwa terdapat pengaruh perubahan batas usia nikah terhadap peningkatan pernikahan di bawah umur. Di Indonesia terdapat aturan dispensasi nikah yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan hal-hal tertentu berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dan dispensasi nikah ini diajukan kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya. Menurutnya, pengaruh tersebut dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang aturan tersebut. serta karena banyaknya hubungan di luar nikah yang menyebabkan kehamilan.

*Kesembilan,* Sri Ahyani membahas pertimbangan analisis permasalahan diantaranya KHI yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah, lebih khusus pada kasus dispensasi nikah yang terjadi karena hamil di luar nikah. Hasilnya adalah peritimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah diklasifikasiakan menjadi dua bagian yaitu: (1) Pertimbangan hukum dimana hakim menetapkan dispensasi nikah sesuai dengan bukti-bukti dan dalil-dalil hukum yang telah diajukan; dan (2) pertimbangan atas dasar keadilan bagi masayarakat, dimana perkawinan dianggap sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah ketika terjadi kasus kehamilan di luar nikah. Selain itu, pertimbangan lainnya juga agar yang menikahi perempuan yang dihamili adalah ayah biologis dari anak.[[27]](#footnote-27)

*Kesepuluh*, Ali Rusdi menjelaskan pada telaah nikah di bawah umur sesuai dengan pemahaman tekstual terdapat hadis yang menggambarkan tentang adanya kebolehan melakuakan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dapat dilihat dalam sejarahnya yaitu kebiasan bangsa Arab yang sangat populer dengan menikahi anak perempuan di bawah umur. Akan tatapi, secara kontekstual pernikahan yang dilakuakan antara Aisyah a.s dan Nibi saw ketika Aisyah berusia di bawah umur perlu dilihat dari banyak aspek yang melatarbelakanginya. Hadis-hadis yang berkaitan dengan perkwinan di bawah umur yang dilakaukan memang tidak memberikan batasan minimal umur seseorang untuk melakukan perkawinan, namun sebaiknya kita lebih melihatnya pada aspek yang sudah ada yaitu batas minimal umur untuk melakukan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang dan telah disahkan oleh pemerintah. Sehingga nikah di bawah umur memang diperbolehkan jika ditinjau dari sisi agama dan tidak diperboehkan dari sisi negara.[[28]](#footnote-28)

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Pernikahan

Nikah secara bahasa memiliki arti bercampur. Jika dilihat dari istilah syara’ merupakan akad yang menghalalkan persetubuhan antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan) yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Kata nikah berasal dari Bahasa Arab “*nikahun, nakaha, tazawwaja*” yang kemudian di terjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi perkwinan.[[29]](#footnote-29) Menurut Abu Zahra Zakaria dalam Cik Hasan Barsi menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang mengandung ketentuan membolehkan berhubungan seksual.[[30]](#footnote-30) Akad yang dimaksud adalah yang mengandung kata nikah atau kata-kata yang sejenis dengannya.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi’i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.[[31]](#footnote-31) Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wath’i (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.[[32]](#footnote-32)

Fischer[[33]](#footnote-33) menjelaskan pernikahan adalah hubungan yang diketahui secara sosial dan monogamous, yaitu hubungan berpasangan antara satu wanita dan satu pria. Sehingga bisa didefinisikan sebagai suatu kesatuan hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana didalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri. Dalam definisi lain pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.[[34]](#footnote-34)

Pernikahan bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusian, dan adanya suatu kebenaran.[[35]](#footnote-35) Pernikahan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk ikatan baik secara lahir dan juga batin antara kedua pasangan (laki-laki dan perempuan) yang selanjutnya sebagai suami istri dengan tujuan membetuk keluarga kekal dan Bahagia. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini mengandung empat hal pokok. Pertama, menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Kedua, menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. Ketiga, menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, yakni bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan untuk selamanya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keempat, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari pernikahan tersebut melahirkan hak dan kewajiban kepada keduanya.

Subekti menjelaskan pernikahan sebagai pertalian sah antara laki-laki dan perempuan dalam kurun waktu yang lama. Menurutnya, pernikahan menjadi peristiwa yang sangat penting bagi kelangsungan hudip masyarakat karena selain menyangkut antara laki-laki dan perempuan tersebut, Pernikahan juga menyangkut pertalian antara orang tua, saudara kerabat dan keluarga besar dari masing-masing pihak.[[36]](#footnote-36)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pernikahan tidak serta merta diartikan sebagai proses untuk memenuhi kebutuhan secara seksual saja meskipu hal tersebut merupakan hal terpenting yang menjadi kebutuhan manusia. Pernikahan juga harus diartikan sebuah ikatan lahir batin. Karena suatu perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* warahmah, dan melahirkan generasi yang soleh/solehah.[[37]](#footnote-37) Ikatan pernikahan tersebut dapat dilihat pada penjelasan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[38]](#footnote-38)

Pernikahan adalah ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Sebagaimana Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS, lalu dijadikan pula Hawa oleh-Nya. Keduanya terikat dalam pernikahan dan hingga sekarang seluruh umat manusia adalah keturunan mereka. Pernikahan juga merupakan bagian dari kebesaran-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan akibat pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam menciptakan alam ini. sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sebagaiman firman Allah dalam surat adz-Dzaariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٤٩

Terjemahannya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Q.S. An-Najm ayat 45,

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰىۙ ٤٥

Terjemahannya:

“Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”

Q.S. An-Nisa ayat 1,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ١

Terjemahannya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Islam menganjurkan kaum muslim untuk menikah. Terlebih menikah merupakan bagian dari sunnah para rasul. Nabi SAW pernah bersabda:

**النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي…..**

Artinya:

“Menikah itu bagian dari sunnah ku, maka siapa yang tidak beramal dengan sunnah ku, maka bukanlah dari golonganku.” (H.R. Ibnu Majah)

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalagan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur’an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun suruhan dalam Al-Qur’an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajiibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur’an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: “siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku” namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.[[39]](#footnote-39)

Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagai orang sunnah dan mubah untuk segolongan yang lainnya.[[40]](#footnote-40) Sehingga, Pernikahan dalam Islam terdapat beberapa hukum, tergantung kondisional seseorang.[[41]](#footnote-41)

1. Pertama, pernikahan dapat menjadi wajib jika seorang muslim telah cukup kemampuan untuk melangsungkannya baik secara lahir batin dan secara finansial.
2. Kedua, pernikahan pernikahan dapat menjadi haram jika pernikahan tersebut diniatkan untuk menzhalimi atau dapat membayakan pasangannya.
3. Ketiga, pernikahan dapat menjadi sunnah jika seseorang telah mampu secara finansial serta pemenuhan lahir batin, tetapi masih mampu untuk tidak melakukan perilaku yang menyimpang dan dikarenakan umur masih sangat muda.
4. Keempat, pernikahan dapat dikatakan makruh jika laki-laki sebagai calon suami tidak mampu secara lahir dan batin, akan tetapi perempuan sebagai calon istrinya cukup mampu untuk menghidupinya.
5. Kelima, pernikahan dapat dikatakan mubah jika seseorang dalam keadaan takut akan terjerumus terhadap perilaku menyimpang, perbuatan zinah, zhalim.

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram.
2. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak.
3. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
4. Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. menikah merupakan pelaksanan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah.
5. Mengikuti Sunah Rasulullah Saw.
6. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah.

Selain adanya tujuan dalam perkawinan, terdapat beberapa asas yang ditetapkan dalam perkawinan. Asas-asas yang dimaksud meliputi:[[42]](#footnote-42)

1. Masing-masing suami dan istri mempunyai tekad bahwa ia hanya akan memiliki seorang istri sebagai pasangan dalam kehidupan berumah tangga.
2. Adanya kerelaan, musyawarah dan demokrasi, serta pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga.
3. Perkawinan untuk selamanya.
4. Anggota keluarga harus memenuhi dan melaksanakan norma agama.
5. Menciptkan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tentram.
6. Hubungan suami dan istri merupakan hubungan *partnership* yang artinya saling membutuhkan, saling menolong, dan adanya keadilan didalam keluarga.

Suatu pernikahan dapat terlaksana jika memenuhi rukun dan syarat. Rukun pernikahan dalam pandangan Imam Mazhab berbeda, dalam mazhab Imam Maliki menyebutkan rukun nikah yakni kedua calon pasangan suami istri, akad (ijab qabul) dan mahar. Imam Syafi’I dan Imam Hambali memiliki pandangan yang sama bahwa rukun nikah yakni akad (*shighah*/ijab qabul) kedua calon pasangan suami istri, dua orang saksi dan wali.[[43]](#footnote-43)

Jika rukun telah terpenuhi selanjutnya ada beberapa syarat pernikahan yang harus dipenuhi juga.[[44]](#footnote-44)

* + - 1. Bukan laki-laki atau perempuan yang haram dinikahi (missal: perempuan dan laki-laki dalam masa iddah atau perempuan yang sudah bersuami dan lain-lain).
      2. Ijab qabul bersifat selamanya.
      3. Laki-laki dan perempuan sebagai calon pasangan suami istri tidak dalam keadaan terpaksa dalam melangsungkan pernikahan.
      4. Dalam ijab qabul, penyebutan nama harus jelas dan tepat.
      5. Bukan dalam keadaan ihram (haji/umrah).

Lengkapnya terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Rukun dan Syarat pernikahan

|  |  |
| --- | --- |
| **Rukun** | **Syarat** |
| Calon Suami | 1. Beragama Islam  2. Atas kehendak sendiri  3. Tidak sedang ihrom haji  4. Bukan Muhrim |
| Calon Istri | 1. Beragama Islam  2. Tidak terpaksa  3. Bukan Muhrim  4. Tidak bersuami  5. Tidak sedang dalam masa iddah  6. Tidak sedang ihrom haji |
| Wali | 1. Mukhallaf (Islam, Dewasa, sehat akal)  2. Laki-laki merdeka  3. Adil  4. Tidak sedang ihrom haji |
| Dua orang Saksi | 1. Islam  2. Dewasa  3. Sehat akalnya  4. Tidak Fasik  5. Hadir dalam akad nikah |
| Ijab & Qabul | Dengan kata-kata “nikah” atau yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul. |

Pernikahan menjadi sarana dalam menggapai kebahagiaan hidup manusia. Pernikahan dapat bertujuan sebagai melaksanakan libido seksual, mempeoleh keturunan, kebahagiaan dan ketentraman, menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah serta sebagai sarana dakwah. Terlepas dari itu terdapat beberapa hikmah yang terkandung dalam pernikahan itu sendiri.

1. Pernikahan dilakukan untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia.
2. Pernikahan dapat memelihara keturunan. Dengan pernikahan yang diatur oleh ajaran Islam, maka keturunan yang dihasilkan akan mendapat kemuliaan.
3. Pernikahan dapat menyelamatkan ahklak manusia disebabkan kerusakan pergaulan.
4. Pernikahan dapat menentramkan jiwa pribadi, selain itu pernikahan dapat melembutkan perasaan antar suami dan istri. Mislanya suami pulang bekerja dan disambut oleh istri dan juga anak-anaknya membuat kebahagiaan tersendiri dan dapat menghilangkan kelelahan darinya.
5. Pernikahan dapat menjalin Kerjasama antara suami istri dalam membina dan membangun keluarga khususnya dalam mendidik anak.

## B. Pernikahan Dini

Menurut WHO, pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut United Nations Children’s Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.[[45]](#footnote-45)

Pernikahan dibawah umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda atau anak-anak yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan pernikahan tegas dikatakan adalah pernikahan dibawah umur. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Pernikahan di usia dini rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti meningkatkan angka kesakitan dan kematian pada saat persalinan dan nifas, melahirkan bayi prematur dan berat bayi lahir rendah serta mudah mengalami stress.

Negara Indonesia sejak tahun 1974 telah mengatur dengan baik peraturan dalam hal menikah walaupun peraturan tersebut berlaku untuk segala keyakinan atau agama masing-masing warga negara. 17 tahun kemudian, pemerintah menambah peraturan pernikahan yang dikhususkan atau diwajibkan kepada seorang Muslim untuk taat dan patuh, peraturan tersebut termaktub dalam sebuah Inpres (Instruksi Presiden) Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa batas usia jika pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun.[[46]](#footnote-46)

Septiani dan Salami berpendapat hukum Undang-Undang perihal batas minimal usia untuk menjaga kesehatan suami dan istri menurut kesehatan baik jiwa dan raganya supaya calon pasangan suami dan istri bisa membangun rumah tangga dengan baik serta menghasilkan anak yang sehat dan baik dan rumah tangga tersebut tidak berakhir dengan kehancuran atau perceraian.[[47]](#footnote-47) Batas usia untuk menikah juga telah diatur KHI dan KHI merujuk pada UU No. 1 Tahun 2019 yakni dalam Pasal 15 ayat (2).

“Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.”

Tujuan adanya syarat pada Undang-Undang di atas agar kedua calon mempelai tidak bercerai karena kebanyakan pasangan menikah muda bercerai akibat belum mencapai kematangan dalam berfikir sedangkan dalam membangun rumah tangga membutuhkan akal untuk berfikir masa depan keluarganya.[[48]](#footnote-48) Batas usia nikah dalam Pasal 6 tentang syarat pernikahan menjelaskan bahwa hadirnya syarat tersebut agar tidak ada pernikahan paksa atau gantung dalam kehidupan bermasyarakat. Haryadi berpendapat bahwa pernikahan adalah urusan pribadi dan pilihan untuk memilih pasangan sebagai teman hidup dalam membangun kehidupan rumah tangga dan dalam pemilihan ini harus bebas dari paksaan dari pihak manapun.[[49]](#footnote-49)

Dilihat dari sisi Hukum Islam, seseorang mencari pasangan hidup sesuai yang dia sukai dan tanpa ada paksaan di dalamnya. Islam mensyariatkan seorang calon suami maupun calon istri untuk mencari pasangan hidupnya sesuai dengan kategori atau syarat yang telah ditentukan. Islam juga menentukan batas usia untuk seseorang menikah dengan kedewasaan atau baligh dan berakal, kedewasaan yang di maksud adalah apabila seorang lakilaki telah mengalami mimpi basah dan seorang perempuan telah mengalami haid.[[50]](#footnote-50) Berakal yang di maksud adalah bisa membedakan jalan baik atau buruk yang akan ditempuhnya.

Syariat Islam mewajibkan seorang menikah ketika telah berilmu dalam mengelola kehidupan berumah tangga. Menikah juga diwajibkan apabila calon mempelai siap menghadapi resiko yang akan terjadi setelah menikah.[[51]](#footnote-51) Usia *baligh* diartikan sebagai seseorang yang bisa melahirkan keturunannya dan dengannya dia bisa menikah. Usia balig menentukan calon mempelai telah bisa diberikan beban seperti melaksanakan hukum agama Islam, baik hukum tersebut bersifat muamalah maupun hudud (ketetapan).[[52]](#footnote-52)

Idealnya calon mempelai menikah adalah saat calon mempelai tersebut telah baligh dan bisa mengarungi kehidupan dengan baik dan perempuan yang akan menjadi istri siap melahirkan keturunan dengan kesehatan yang baik dan kedua mempelai siap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan baik.

Hukum Islam dalam memaknai batasan usia nikah dimulai dari balig. Balig yang di maksud adalah anak laki-laki yang telah melakukan mimpi basah ketika tidur dan dari mimpi tersebut menyebabkan keluarnya air mani dan dalil balig ini dijelaskan secara tidak langsung oleh Allah swt dalam Q.S. An-Nisa ayat 6-11.[[53]](#footnote-53)

**وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ٦ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۖ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ٧ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ٨ وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ٩ اِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا ࣖ ١٠ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْۚ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ١١**

Terjemahannya:

“6. Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”

“7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

“8. Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat,144) anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu145) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

“9. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). “

“10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

“11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Batas usia nikah masih dalam perdebatan para ulama. Para ulama menentukan batas usia nikah dari hal kedewasaan seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Menurut ulama Syafi’iyyah batas minimal usia dewasa adalah pada saat usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah batas usia kedewasaan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik batas kedewasaan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan.[[54]](#footnote-54)

Imam Abu Hanifah dalam Yulia[[55]](#footnote-55) berpendapat bahwa orangtua diperbolehkan untuk menikahkan anak perempuannya yang belum baligh, baik mereka masih gadis maupun seorang janda. Apabila anak tersebut telah balig maka dia boleh memilih menikah dengan siapa yang dia senangi, tanpa meminta persetujuan dari orangtuanya. Posisi orangtua adalah wali jadi tidak boleh menikahkan anak perempuannya tanpa seizinnya apalagi memaksa untuk menikah dengan lelaki yang tidak disenanginya.

Melihat perbendaan pendapat para ulama di atas tentang batas dewasa, dapat dipahami bahwa batas usia dalam menikah tidak disyariatkan dalam al-Qur’an dan hadits secara langsung. Pernikahan yang dilakukan seseorang pasangan yang di bawah usia maupun telah balig dan telah melaksanakan semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah maka dihukumi sah dalam syariat Islam.

Pernikahan dini merupakan ikatan yang dilakukan suami istri yang belum mencapai usia dewasa.[[56]](#footnote-56) Usia dewasa dalam menikah ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yakni 19 tahun baik dari laki-laki dan perempuan. Dapat dikatakan pernikahan dini karena berkaitan dengan persiapan seorang anak/remaja yang belum siap secara maksimal, mulai dari psikologi, mental dan juga finansialnya. Selain itu pernikahan dini juga berkaitan dengan pemahaman anak/remaja yang masih kurang tentang kehidupan khususnya dalam hubungan keluarga serta menjaga emosionalnya yang menyebabkan hubungan rumah tangga yang dijalankan tidak harmonis.[[57]](#footnote-57) Menurut Mikasari, remaja melakukan pernikahan dini dianggap sebagai anak yang belum memenuhi persiapan fisik, mental dan materi (finansial), hal tersebut dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.[[58]](#footnote-58)

Perkembangan masa remaja secara global berlangsung antara umur 12-21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir. Sedangkan pada umumnya masa pubertas terjadi antara 12-16 tahun padaanak laki-laki dan 11-15 tahun pada anak wanita.[[59]](#footnote-59) Menurut WHO batas usia remaja adalah 12-24 tahun sedangkan menurut Kemenkes RI adalah 10-18 tahun. Batasan usia remaja menurut para ahli dapat dilihat dalam tabel yang telah dibuat oleh Damayanti.[[60]](#footnote-60)

**Tabel 2.** Batasan Remaja Para Ahli

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pendapat para ahli** | **Remaja Awal** | **Remaja pertengahan** | **Remaja akhir** | **Dewasa Muda** |
| 1 | Fieldman-Elliot | 10-14 Tahun | 15-17 Tahun | 18-20 Tahun | - |
| 2 | Stantrock | 10-13 Tahun | 14-17 Tahun | 18-22 Tahun | - |
| 3 | James-Traore | 10-14 Tahun | 15-19 Tahun | - | - |
| 4 | Indonesia | - | 10-19 Tahun | - | Belum Menikah |

Erik Erikson mengatakan usia remaja adalah saat dimana seseorang mengalami fase identity vs role confusion, yaitu dimana remaja sedang dalam proses mencari jati dirinya yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka waktu yang panjang. Jati diri ini berhubungan dengan kepercayaan, konsep ideal dan nilai-nilai yang membentuk karakter. Bisa saja konsep yang diterapkan di lingkungan pergaulannya berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah, sehingga remaja menjadi bingung harus mengikuti yang mana.[[61]](#footnote-61) Di sisi lain, mereka juga sering kali takut akan ditolak oleh lingkungannya apabila tidak mengikuti jalan berpikir atau tindakan teman-teman sebayanya. Misalnya, ketika lingkungan disekitarnya menganggap bahwa berhubungan seksual sebelum menikah adalah hal yang biasa.[[62]](#footnote-62) Namun, ajaran dalam keluarganya menolak dengan keras tentang sex sebelum menikah. Jika remaja tersebut memilih jalan yang salah dan terjebak dalam pergaulan bebas, bisa saja hal-hal tersebut memicu pada pernikahan dini, misalnya karena hamil di luar nikah yang disebabkan remaja secara sadar melakukan hubungan seksual sebelum menikah atas dasar saling menyukai dan bukan karena pemerkosaan. Selain itu, masa remaja adalah saat dimana rasa penasaran seseorang menjadi sangat tinggi dan ingin mencoba banyak hal-hal baru yang ada di sekitarnya tanpa adanya kekangan dari pihak lain seperti orang tua atau guru.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Fenomena pernikahan dini bagai fenomena gunung es yang hanya tampak sebagian kecil di permukaan, sangat sedikit terekspos di ranah publik, tetapi kenyataannya begitu banyak terjadi di kalangan masyarakat luas. ketika kita menelusuri akar sejarah tentang pernikahan dini di Indinesia, khususnya di pulau Jawa sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh kakek dan nenek moyang kita. Pada konteks mereka, terdapat stigma negatif jika seorang perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka.[[63]](#footnote-63) Maraknya pernikahan dini dalam modern ini menimbulkan banyak permasalahn dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum. Dari pihak perempuan dan laki-lakipun kadang menggampangkan masalah pernikahan dini. Mereka tidak mengetahui resiko dibalik tindakan ketika mereka telah melangsungkan sebuah pernikahan. Banyak faktor yang harus mereka fikirkan mulai dari kesehatan perempuan, kesiapan mental kedua belah pihak, sosial masyarakat juga dalam hal agama.[[64]](#footnote-64)

Secara sosiologis, pernikahan dini mengganggu keharmonisan keluarga dan membuat pasangan lebih rentan untuk bercerai. Hal ini karena sosiologi hukum terlebih dahulu mempertimbangkan realitas sosial sebelum berurusan dengan hukum. Sebagai bagian dari upaya pemerintah, usia minimum untuk pernikahan yang sah bagi perempuan dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun.

Mencegah perkawinan anak. Undang-Undang Amendemen Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menaikkan usia resmi seorang wanita untuk menikah menjadi 19 tahun, membuat kontrasepsi lebih mudah bagi semua yang terlibat. Semua anak perempuan menikah dan memiliki anak.

Pejabat perkawinan juga memberikan ceramah yang menasihati calon pengantin tentang pentingnya persiapan fisik dan mental sebelum pernikahan. Untuk mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur, perlu dikembangkan peraturan surat nikah yang tepat untuk mengatasi masalah perkawinan anak. Hal ini juga membutuhkan upaya kelompok agama seperti Majelis Ulama.

Indonesia (MUI). Niatnya adalah mengeluarkan fatwa perkawinan anak sebagai salah satu inisiatifnya. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan kementerian pendidikan untuk mengurangi dampak putus sekolah, misalnya sekolah.

## C. Faktor dan Dampak Pernikahan Dini

Penelitian Rifiani[[65]](#footnote-65) sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan pada usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga dengan menikahkan salah satu anak perempuannya sekalipun masih sangat belia, akan cukup meringankan beban orang tuanya khususnya dari sisi ekonomi; (2) Orang tua, anak, dan masyarakat dengan tingkat kesadaran pendidikan yang rendah umur; (3) Ada kekhawatiran dikalangan orang tua akan mendapatkan aib karena anak perempuannya sudah berpacaran dengan laki-laki segera menikahkannya; (4) Gencarnya media massa baik cetak maupun elektronik khususnya internet yang belum bisa dikendalikan dalam batas aman untuk dikonsumsi publik yang mengekspos pornografi dan adegan-adegan yang tidak layak dipertontonkan secara umum menyebabkan remaja modern kian banyak yang terjerembab dalam lingkup “*permissive society*” yang membolehkan pola hidup yang bagaimanapun yang mereka inginkan; (5) Perkawinan usia muda terjadi karena orang tua takut anaknya menjadi perawan tua jika tidak segera menerima pinangan dari laki-laki yang melamarnya.

Faktor lain penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor orangtua yang ingin cepat-cepat menikahkan anaknya, ada pula yang hamil diluar nikah, ekonomi dan juga pendidikan. Namun yang paling dominan adalah karena faktor orang tua agar si anak cepat-cepat untuk dinikahkan dan mudah menerimana pinangan si calon pria. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di Desa Bedahan secara garis besar ada tiga yaitu dampak psikologis, kesehatan, dan juga sosial-ekonomi. Jika dilihat dari dampak psikologis masih sering mengalami masalah seperti mudah emosi, stress, dan terbebani, dari segi kesehatan karena belum matangnya alat reproduksi perempuan rentan mengalami melahirkan bayi prematur, jika dilihat dari segi sosial-ekonomi yaitu kurangnya bersosialisasi kepada masyarakat setempat malu karena pendidikannya pun terputus, mereka hanya bekerja seadanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masih bergantung kepada orangtuanya.[[66]](#footnote-66)

Dapak pernikahan dini dibagi atas dua:

Dampak positif. Dengan adanya pernikahan dini ini, dapat mencegah teradinya perzinaan di kalangan remaa, karena dengan menikahkan anak maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dapat dicegah, secara tidak langsung uga mencegah teradinya hamil diluar nikah dikalangan remaja. Selain itu, pernikahan dini juga dapat mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan aanak-anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan juga beban ekonomi orang tuanya juga terbantu.

Dampak negatif. Pernikahan dini menyebabkan Perselisihan menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada istri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.Selain itu pasangan juga belum mempunyai pemahaman sosial yang begitu luas untuk berbaur dengan dunia luar, ketidaksiapan dalam memecahkan masalah karena minim akan pengetahuan dan secara psikologis dampak negatif pernikahan dini adalah sering terjadinya pertengkaran antara suami dan istri disebabkan karena mereka berdua sikapnya masih labil.

Dampak pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya. Kematangan psikologis kurang, cara penyelesaian masalah kurang berpikir panjang, melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal. Emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti.[[67]](#footnote-67)

Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama’ berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[[68]](#footnote-68)

Fenomena pernikahan dini pada masyarakat disebabkan oleh kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anaknya, kesiapan diri, pengurangan beban ekonomi keluarga, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Perkawinan seperti ini berimplikasi pada pengasuhan anak dan cara pasangan mendidik anak serta ketegangan dalam pernikahan yang diakhiri dengan perceraian. Persepsi masyarakat terhadap praktik pernikahan dini dikategorikan menjadi kelompok pro dan kontra. Alasan mereka yang tidak setuju menikah adalah kesiapan pasangan dalam mengelola keluarga, kematangan usia pasangan secara biologis, sosiologis maupun psikologis yang akan mempengaruhi kehidupan keluarga. Sebaliknya, bagi mereka yang setuju dengan pernikahan dini ini, mereka mengusulkan agar pernikahan ini dilakukan untuk menyelamatkan agama dan menghindari seks bebas. Selain itu, ada sebagian orang tua yang bangga jika anaknya segera menikah dan tidak telat usia. Alasan ekonomi menjadi pertimbangan lain bagi orang tua bahwa menantu akan menghidupi mereka secara finansial.[[69]](#footnote-69)

Suatu kondisi atau kejadian yang tidak baik, tidak wajar dan sangat menghawatirkan, yang berdampak pada kehilangannya masa depan remaja dalam proses pembentukan jati diri akibat pergaulan bebas yang mencoreng nama keluarga yang membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya, yang secara tidak langsung pernikahan dini ini juga telah menjadi keputusan terakhir dari orang tua dalam menangani masalah yang telah diperbuat anaknya, maka dalam menghindari terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas, para remaja menanggapi dan menyarankan, agar para remaja lebih menumbuhkan pemikiran-pemikiran secara rasional yakni menanamkan nilai-nilai agama, berfikir positif, memberi batasan-batasan dalam pergaulan dan berpacaran, memikirkan pendidikan demi kesuksesan masa depan dan menjadikan pacar sebagai pemotivasi belajar, agar tidak terjerumus dalam pernikahan dini.[[70]](#footnote-70)

Pernikahan dini tak hanya berpotensi menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, melainkan juga masalah kesehatan seperti stunting dan kesehatan reproduksi terutama bagi wanita. wanita yang menikah pada usia dini mempunyai rentang waktu bereproduksi yang lebih panjang, sehingga berisiko terhadap penyakit reproduksi. Pernikahan dini juga memungkinkan para pasangan suami istri (pasutri) memiliki banyak anak jika tidak diimbangi dengan program Keluarga Berencana (KB). Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi, karena berisiko terhadap kehamilan, dan persalinan yang tidak aman.

## D. Hukum Islam tentang Pernikahan Dini

Islam menunjukan pentingnya kedewasaan dalam pernikahan meskipun usia perkawinan dalam Islam pada dasarnya tidak diatur secara langsung. Islam menjelaskan bahwa tidak boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil kecuali sudah *baligh*. *Baligh* yang dimaksud dalam surah tersebut adalah mampu mental serta spiritual (Aqidah) seseorang yang melangsungkan pernikahan.

**وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ٦**

Terjemahannya:

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nur: 32,

**وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٣٢**

Terjemahannya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Rasulullah saw. bersabda,

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا األعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و األسود على عبد هللا فقال عبد هللا كنا مع النبي صلى هللا عليه و سلم شبابا ال نجد شيئا فقال لنا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء

Artinya:

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’masy dia berkata : “Telah menceritakan kepadaku dari ’Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : “Aku masuk bersama ’Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (H.R. Bukhari)[[71]](#footnote-71)

Batasan *baligh* bagi wanita telah disepakati para ulama yaitu haid dan hamil, sedangkan untuk laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani. Imam Syafi’I menambahkan bukti baligh ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu di ketiak. Akan tetapi pada pembatasan usia menikah, Islam tidak memiliki aturan yang baku dan para ulama berbeda pendapat. Dari golongan Hanabilah dan Syafi’iyah membatasi usia nikah yakni mencapai 15 tahun. Imam Abu Hanabilah membatasi usia nikah adalah laki-laki mencapai 19 tahun dan perempuan mencapai 17 tahun. Sedangkan Imam Maliki membatasi usiah nikah adalah laki-laki dan perempuan mencapai 18 tahun.[[72]](#footnote-72) Ketidakbakuan ini juga disebabkan karena penggambaran batasan usia nikah (*baligh*). Pendapat pertama menjelaskan bahwa *baligh* ditandai dengan mimpi yang disertai keluar air mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan.Pendapat kedua juga menjelaskan bahwa batasan usia nikah dilihat dari akal dan jiwa.[[73]](#footnote-73)

## D. Aturan Batas Usia Nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019

Usia menikah merupakan batasan dan ukuran ideal yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur pernikahan dan membatasi terjadinya praktik perkawinan anak di masyarakat.[[74]](#footnote-74) Usia ideal menikah di setiap negara biasanya memiliki regulasi dan tolak ukur yang berbeda. Di Indonesia, regulasi tentang usia menikah diatur dalam beberapa peraturan negara seperti UU No.16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia minimal pernikahan, yakni 19 tahun dan 21 tahun sebagai batas cukup menikah.[[75]](#footnote-75) Regulasi ini pun sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengkategorikan anak sebagai mereka yang usianya di bawah 18 tahun sehingga mereka menilai usia ideal untuk menikah seharusnya minimal 21 tahun.[[76]](#footnote-76) Sedangkan beberapa negara bagian di Amerika, menetapkan usia minimum resmi untuk menikah yakni 15 hingga 18 tahun.[[77]](#footnote-77) Selain ditentukan oleh regulasi, batasan usia menikah juga ditentukan oleh norma sosial dan agama yang ada dalam masyarakat. Dalam Islam, usia menikah diatur dalam beberapa mazhab seperti mazhab Syafi’i dan Hanbali yang berpendapat bahwa usia ideal dalam menikah ialah 15 tahun.[[78]](#footnote-78) Oleh karena itu, penentuan dalam memperbolehkan seorang individu untuk menikah memiliki konsepsi dan standarisasi yang berbeda-beda.

Beberapa negara Muslim juga memiliki aturan pembatasan usia menikah. Di Aljazair, dalam pasal 7 dari The Family Code 1984 dengan tegas mengemukakan bahwa usia minimal calon mempelai laki-laki adalah 21 tahun dan calon mempelai perempuan adalah 18 tahun. Negara Mesir menetapkan ketentuan batas usia terendah untuk menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Negara Irak, berdasarkan The Code of Personal Status 1959, batas usia terendah untuk menikah adalah 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk negara Yordania, batas terendah umur untuk menikah setidaknya laki-laki berumur 16 tahun dan perempuan berumur 15 tahun. Usia terendah untuk menikah bagi laki-laki terdapat di negara Yaman Utara yaitu 15 tahun, sedangkan batas minimal untuk menikah bagi perempuan terdapat di Yordania, Maroko, Yaman Utara dan Turki yaitu pada usia 15 tahun.[[79]](#footnote-79)

Penetapan batasan usia menikah yang ideal berkaitan erat dengan fenomena pernikahan dini. Menurut Baysak[[80]](#footnote-80) penetapan usia ideal dalam menikah diatur oleh negara untuk menghindari terjadinya pernikahan dini yang dapat memberikan dampak negatif bagi anak. Secara psikologis pernikahan dini mengakibatnya trauma, ketakutan, dan bahkan tindakan bunuh diri karena ketidaksiapan mental pada anak dalam menghadapi permasalahan rumah tangga.[[81]](#footnote-81) Sedangkan secara biologis pernikahan dini mengakibatkan munculnya permasalahan kesehatan reproduksi pada perempuan dan laki-laki.[[82]](#footnote-82) Selain kesehatan, pernikahan dini juga mengakibatkan adanya keterbatasan memperoleh pendidikan bahkan berujung pada perceraian.[[83]](#footnote-83) Sejalan dengan itu, Nanda[[84]](#footnote-84) juga menuliskan bahwa banyak anak tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan setelah menikah. Dalam konteks ini, negara mengatur dan membatasi kelegalan usia pernikahan agar seseorang yang menikah dinilai telah matang jiwa dan raganya sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan terlaksananya tujuan pernikahan secara maksimal sesuai dengan norma agama dan sosial.[[85]](#footnote-85) Oleh karena itu, negara menetapkan aturan untuk membatasi usia nikah agar menghindari dan meminimalisir konsekuensi-konsekuensi dari pernikahan dini.

Pada dasarnya penetapan usia dewasa dipengaruhi oleh faktor kejiwaan. Faktor ini menjadi salah satu unsur dalam menetapkan aturan pembatasan usia menikah.[[86]](#footnote-86)

1. 12-14 tahun disebut juga masa pra remaja. Masa ini merupakan masa mencari identitas diri dan mulai berkembang, atau bisa juga sebagai kegagalan mencari identitas, prestasi apalgi jika peran orang tua makin tergeser oleh teman sebaya di mana sering kali anak terjebak dalam kenakalan remaja, sering tidak tenang, kurang bergerak pesimis dalm lain sebagainya. Kemunculan lain juga dapat diluhat dari tanda-tanda gejolak hastrat seks yang makin naik.
2. 15-19 tahun disebut juga masa remaja atau masa idealis, selalu tidak puas dan protes kepada pihak lain. Masa ini juga ditandai dengan mulai melihat pada kondisi sekelilingnya. Kebutuhan mendapatkan rahasia dan pribadi. Aktif di berbagai organisasi dan mulai menjalin hubungan cinta kasih yang semakin serius.
3. 20-25 tahun disebut sebagai masa dewasa muda. Masa ini muncul dimana seseorang mulai memantapkan pendirian hidup untuk persiapan masa mendatang. Lebih realistis dan peka terhadap kondisi sosial, keinginan menjadi orang tua, produktif kreatif baik bagi dirinya maupun orang lain.
4. 25-40 tahun disebut sebagai masa dewasa madya. Pada masa ini keseriusan pada karir dan pengalaman rumah tangga hingga memforsir diri untuk maju. Masih sering mencari pijakan yang lebih baik untuk masa depan keluarganya.

Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Aturan yang baru ini sudah diterapkan di KUA maupun Dukcapil, namun pada pelaksanaannya belum mencapai keefektifan yang disebabkan beberapa faktor baik dari dalam diri masyarakat itu sendiri maupun pemerintah/penegak hukum. Sehingga atas ketidakefektifan pelaksanaan “UU yang baru” atau “UU No. 16 Tahun 2019” tersebut, tidak menunjukkan adanya penurunan angka perkawinan dini.[[87]](#footnote-87)

Sesuai dengan muatan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon dalam merubah batas usia perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.[[88]](#footnote-88) Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diimplementasikan dengan baik oleh implementor kebijakan, beberapa kendala yang muncul digarisbawahi sebagai persoalan lingkungan sosial seperti kemiskinan, pendidikan hingga adat & budaya.[[89]](#footnote-89)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi nikah sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Pernikahan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. Pengadilan Agama Pemalang mengalami kenaikan yang signifikan.[[90]](#footnote-90)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dilakukan saat diterapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan lebih banyaknya kasus pernikahan dibawha umur pada saat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan daripada saat belum diterapkan. Berbicara hukum progresif, bukan hanya semata-mata keadilan dengan penegakan hukum, melainkan keadilan dan kebahagiaan masyarakat. Maka dari itu hukum progresif ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum. Kaitannya hukum progresif dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, dimana hukum progresif dapat memposisikan setiap kali ada ketidak sejalanan, karena pada dasarnya hukumlah yang harus ditinjaudan diperbaiki, karena para pelaku hukum banyak yang di paksa kedalam skema sebuah hukum. Penafsiran hukum mempertimbangkan dari berbagai aspek.[[91]](#footnote-91)

Perubahan batasan usia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur tentang larangan perkawinan di bawah umur. Undang-undang tersebut memberikan pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Batasan usia menikah sudah dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia menikah. Islam tidak mengatur batasan usia seseorang untuk menikah. Dengan meningkatkan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, guna memberikan perlindungan bagi anak-anak yang masih di bawah umur agar lebih siap secara biologis dan psikologis. Oleh karena itu, disarankan agar peraturan ini dapat dijadikan acuan dan diterapkan untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

## E. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pantai yang sebagian besar pernghasilan mereka berasal dari hasil penangkapan ikan (nelayan). Hal itu menjadi karakteristik kuat bagi masyarakat pesisir mengingat ekonomi wilayah, budaya, sarana dan prasarana di wilayah tersebut.[[92]](#footnote-92) Budaya masyarakat pesisir merupakan orientasi yang selaras dengan alam, misalnya dari segi teknologi memanfaatkan sumber daya alam (teknologi adaptif) dengan kondisi pesisir.[[93]](#footnote-93)

Masyarakat pesisir identik dengan profesi nelayan meskipun tidak semua masyarakat mengambil profesi tersebut. Nelayan memiliki makna pekerjaan menangkap ikan.[[94]](#footnote-94) Melihat pada penelitian Faizal dalam Buan[[95]](#footnote-95), masyarakat pesisir umumnya memiliki Pendidikan rendah, produktivitas yang sangat tergantung pada musim, terbatasnya modal usaha, kurangnya sarana penunjang, buruknya mekanisme pasar dan sulitnya transfer teknologi dan komunikasi yang mengakibatkan pendapatan masyarakat pesisir menjadi tidak menentu. 120692

Terdapat 4 sifat dan karakteristik masyarakat pesisir, antara lain,[[96]](#footnote-96)

1. Sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan. Contohnya seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengelolaan hasil perikanan yang memang dominan dilakukan.
2. Sangat di pengaruhi oleh faktor lingkungan, musim dan juga pasar.
3. Struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum banyak dimasuki oleh pihak luar. Hal ini dikarenakan baik budaya, tatanan hidup, dan kegiatan masyarakat relatif homogen dan maasing-masing individu merasa mempunyai kepentingan yang sama dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi hukum yang sudah disepakati bersama.
4. Sebagian besar masyarakan pesisir bekerja sebagai Nelayan. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.

Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan masih kental dengan adat atau budaya. Selain itu, banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir.[[97]](#footnote-97) Akan tetapi, masyarakat pesisir mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir.[[98]](#footnote-98)

Masyarakat pesisir masih tergolong kelas menengah ke bawah, dan memang tidak semua masyarakat pesisir mengalami kesulitan. Kemiskinan masyarakat pesisir diakibatkan oleh persaingan antara pukat dan nelayan tradisional serta tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan infrastruktur. Ditambah lagi, kurangnya peluang bisnis, kurangnya akses informasi, teknologi dan modal, serta kecenderungan budaya dan gaya hidup yang boros membuat posisi negosiasi masyarakat miskin semakin lemah.[[99]](#footnote-99)

## F. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah menurut kamus besar bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dispensasi pernikahan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Sebagaimana yang dimaksud dengan pengertiannya, tujuan dispensasi nikah adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan atau perkawinan secara hukum positif. Maka dari itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah.

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa usia ideal menikah untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun, jika belum memenuhi usia tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur pernikahan namun persyaratan yang umum adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepadayang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.

Dispensasi perkawinan di bawah umur adalah permohonan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai perempuan yang belum cukup umur untuk menikah, bagi laki-laki yang belum mencapai usia 19 tahun dan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan penelaahan KHI dengan temuan penelitiannya yaitu dimana KHI menjadi dasar hukum untuk menjembatani dispensasi nikah sehingga putusan dispensasi nikah diimplementasikan dalam mengesampingkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) mengenai batasan usia yaitu usia calon laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya 19 tahun, dimana KHI merupakan penelaahan terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk melaksanakan dispensasi perkawinan dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama ada 4 faktor diantaranya faktor budaya, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan pendidikan, dan faktor yang terakhir adalah kehamilan di luar nikah.

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi nikah yang dimaksud dalam UU no.1 tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap usia pernikahan yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dispensasi nikah dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yangingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harusmengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariyah.
2. Permohonan dispensasi kawin diajukan olah calon mempelai pria yangbelum berusia 19 tahun, wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atauorang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atauMahkamah Syar’iyah dalam daerah dimana calon mempelai dan/atauorang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
3. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai priadan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-samakepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam daerahhukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempattinggal.
4. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dapat memberikandispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluargadekat atau walinya.
5. Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berupapenetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, makapihak Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.[6]

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memiliki pengertian tentang kedewasaan. Seseorang telah dianggap dewasa apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Disamping itu Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi.[[100]](#footnote-100)

Kependudukan mengatur setiap penduduk warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), meskipun tidak tertulis secara jelas kata dewasa akan tetapi masyarakat mengganggap usia 17 (tujuh belas) tahun dapat dikatakan telah dewasa, hal ini merujuk pada Undang-Undang Pemilu yang memberikan hak suara kepada warga Negara yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.[[101]](#footnote-101) Sedangkan dalam hukum Islam usia yang dipautkan dalam perkawinan, dipersyaratkan yang telah mencapai baligh.[[102]](#footnote-102) Sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam KHI Pasal 15 secara tegas telah menyebutkan bahwa batas umur minimal calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan dalam perkawinan yang matang antara lain persiapan fisik. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan, serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami isteri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembankan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan dibawah umur.

Meskipun dalam Undang-undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seseorang menikah dibawah umur tersebut. Seseoang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari pengadilan agama. Di pengadilan agama permohonan izin menikah disebut dengan permohonan dispensasi nikah.[[103]](#footnote-103)

Dispensasi nikah adalah permohonan keringanan supaya bisa dinikahkan untuk laki-laki yang belum bermur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun, bisa salah satu saja atau dua-duanya[[104]](#footnote-104) berdasarkan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja. Baligh yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikiran telah mampu mempertimbangkan atau meperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda baligh bagi wanita yakni telah mengalami menstruasi sedangkan tanda bagi laki-laki yaitu telah mengeluarkam air mani.[[105]](#footnote-105)

Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri, Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri, seperti yang dijelaskan bahwa dispensasi merupakan keputusan administrasi negara terbatas untuk menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. Oleh karena itu, rumusan mengenai alasan yang diperbolehkan menjadi unsur yang paling mendasar untuk dapat diberikan suatu dispensasi. Dengan demikian dispensasi dimaksudkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang mungkin akan lebih memperjelas pernyataan umum dari tujuan keberlakuan hukum, yaitu kebaikan umum.[[106]](#footnote-106)

Dispensasi pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita belum mencapai usia 16 tahun. Keberadaan pemberian dispensasi kawin tentulah harus memiliki pedoman praktik yang ketat. Sebab adanya dispensasi kawin bak dihadapkan pada dua mata pisau. Di satu sisi pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai jalan mundur perjuangan melindungi anak dari Perkawinan usia anak yang memiliki banyak risiko. Setidaknya menurut Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA menjelaskan ada tiga dampak yang tampak dan mudah diukur sebagai dampak Perkawinan usia anak, yaitu dampak terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Di sisi lain pemberian dispensasi kawin dipandang sebagai suatu langkah untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar lagi.

Mengenai dispensasi nikah ini tentu ada perbedaan pendapat dalam memahaminya karena antara hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu berbeda. Hal ini tentu membingungkan bagi kita yang awam ini, apakah antara hukum islam dan hukum positif mengenai dispensasi ini selaras atau betolak belakang atau saling melengkapi satu sama lain? Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai titik singgung dispensasi nikah dalam perspektif hukum islam dan perspektif hukum positif.

1. Hukum Islam

Dalam hukum islam tidak ada yang menjelaskan secara spesifik mengenai dispensasi nikah dalam fikih pun tidak ada batasan minimal dan maksimal bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah. Tidak adanya batasan usia nikah ini bukan berarti islam memperbolehkan untuk menikah dibawah umur, karena syarat dalam hukum islam bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah yaitu harus sudah baligh yang mana aturan baligh bagi perempuan dan laki-laki tentu berbeda dan umur dari setiap orang yang baligh juga berbeda hal inilah yang menjadikan banyaknya ulama fiqih yang berbeda pendapat mengenai usia baligh bagi laki-laki atau perempuan.

Dalam Al-Qur’an juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas usia pernikahan, namun dalam Al-Qur’an menjelaskan secara umum mengenai kapan seseorang bisa dinikahkan, seperti dalam Surah An-Nisa:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

Terjemahannya:

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (QS. Al-Nisâ [4]: 6).”

Ayat diatas menjelaskan mengenai anak-anak yang masih muda tidak dapat dinikahkan setelah mereka baligh. Dijelaskan juga mengenai konsep dasar perkawinan dalam surah An-Nur:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahannya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nûr [24]: 32).

Ayat diatas juga sama sekali tidak menjelaskan mengenai batas usia perkawinan namun dalam ayat tersebut menjelaskan serta mensyaratkan adanya kemampuan untuk membina rumah tangga serta memikul tanggung jawab perkawinan. Yang mana kemampuan disini dapat berarti mengenai materi dan biologi, namun tidak hanya itu mengenai kemampuan untuk mendidik pasangan serta anak-anak kelak, kemampuan agama, sosial dan budaya yang positif juga yang nantinya akan berpengaruh ke anak dan cucu. Serta mampu menerima pasangan tidak hanya dari kelebihannya namun juga kekurangannya dan saling melengkapi.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa dalam islam tidak mengatur mengenai dispensasi nikah karena mayoritas ulama hanya menyubutkan baligh, tidak menentukan batas usia perkawinan, dengan ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada dispensasi nikah dalam islam karena dalam islam tidak ada menjelaskan mengenai batasan usia nikah secara khusus.

1. Hukum Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan mengatur bagi laki-laki maupun perempuan harus miliki kematangan baik fisik, jiwa dan raga jika hendak melangsungkan pernikahan sehingga ketika menikah mereka dapat membina pernikahan dengan baik tanpa ada perceraian.

Undang-undang juga mengatur mengenai pernikahan dibawah umur, yang mana jika laki-laki atau perempuan yang ingin menikah namun belum cukup umur maka harus mengajukan dispensasi nikah dan harus dengan persetujuan dari kedua calon mempelai dan juga orang tua mempelai yang belum cukup umur. Hal ini sejalan dengan UU No.1 tahun 1974 dan telah diperbaharui menjadi UU No.16 tahun 2019.

Dalam undang-undang sebelumnya yakni UU No.1 tahun 1974 mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan yakni bagi laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun) yang telah dirubah atau diperbaharui menjadi UU No.16 tahun 2019 baik laki-laki maupun perempuan batas minimal perkawinan adalah (19 tahun). Tentang hal ini menimbang agar ketika hendak melangsungkan perkawinan calon memperlai sudah siap dari segi fisik, mental agar menurunkan angka kelahiran yang membludak serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat memenuhi hak-hak anak kedepannya sehingga dapat teroptimal tumbuh kembang dengan didampingi orang tua.

Salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis. Makna kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dan telah diperbaharui menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan kesiapan lahir bathin fisik dan psikis anak.

Dengan penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa sebenarnya hukum positif ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam, terlebih mengenai dispensasi nikah karena hukum positif tetap mengatur mengenai dispensasi nikah tanpa mengesampingkan hukum islam. Karena hukum positif ini melengkapi apa yang belum diatur dalam Hukum Islam dan menyesuaikan dengan masyarakat yang ada diwilayah tersebut agar mencapai keinginan dan ketentuan yang sesuai dengan masyarakat dalam negara.

## G. Aturan Dispensasi Nikah berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pengertian dispensasi kawin atau dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Jelasnya pada aturan ini ditegaskan pada pasal 6 bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua atau wali. Tujuan aturan ini dilakukan sebagai:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
5. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah:

1. Surat permohonan;
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
5. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali (Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019). Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-Cuma (prodeo).

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

1. Orang tua;
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua;
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Adapun hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin;
2. Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan: a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin; b) Calon suami/isteri; c) Orang tua/wali calon suami/isteri. Apabila Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.

Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

* 1. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
  2. Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
  3. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
  4. Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim mengidentifikasi:

* + 1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
    2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
    3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;

* + 1. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
    2. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
    3. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
    4. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
    5. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
    6. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
    7. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD): a). Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan b). Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat:

* + 1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
    2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
    3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
    4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
    5. Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

* + 1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
    2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak

Regulasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung dimungkinkan sebagai langkah tepat dalam menekan pernikahan dini dengan alasan yang tidak karena keterpaksaan dan juga tetap mementingkan keselamatan dan kemaslahatan sang anak.

Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merupakan bentuk responsif Mahkamah Agung dalam menjawab permasalahan terkait Perkawinan usia anak. Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Dispensasi Kawin tentu Mahkamah Agung melalui Peradilan di bawahnya dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar tidak hanya untuk menciptakan keadilan namun tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai dalam hal ini tujuan utama dititikberatkan pada kepentingan anak. Sebagaimana pasal 2 norma *a quo*, Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non- diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang serta kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi masa depan bangsa.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan dan memutus permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana tercantum pada pasal 10 *a quo* disebutkan lebih lanjut bahwa pada hari sidang. pertama, Pemohon wajib menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon suami/istri dan Orang Tua/Wali calon suami/istri. Dalam hal pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut. Apabila dalam hal Pemohon tidak hadir kembali pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara sah dan patut maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur dengan putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard). Dalam perspektif ini, Hakim harus benar-benar dapat memastikan kepentingan anak dengan menghadirkan anak secara langsung pada persidangan.

Selanjutnya, Sebagaimana Pasal 12 ayat 1 dan 2 Norma *a quo* Hakim dalam persidangan pun diharuskan untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri tentang risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud di atas maka dapat mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Perkawinan di bawah umur memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang ke semuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut. Tidak hanya masalah kesehatan, perkawinan yang belum melampaui batas usia anak sangat mungkin terjadinya eksploitasi anak dan meningkatnya ancaman kekerasan terhadap anak. Di atas itu semua, perkawinan anak akan menimbulkan dampak buruk terhadap pendidikan anak. Dalam batas penalaran yang wajar, apabila pendidikan anak terancam, hal demikian potensial mengancam salah satu tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit dicapai jikalau angka perkawinan di bawah umur tidak bisa dicegah sedemikian rupa. Sehingga lebih jauh lagi, kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sejatinya adalah perwujudan gagasan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan dan mencapai keempat tujuan bernegara Indonesia itu. Dengan demikian, pembangunan negara Indonesia tidak terjebak menjadi sekedar “*rule-driven*”, melainkan “*mission-driven*”, yang didasarkan atas aturan hukum.

Dalam menangani permasalahan perkawinan usia anak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu represif dan preventif. Usaha represif menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat dilakukan setelah terjadinya kejadian perkawinan usia anak, usaha tersebut salah satunya adalah pelatihan parenting skill. Dalam perspektif usaha preventif, penanganan permasalahan perkawinan usia dini dilakukan sebelum kejadian itu terjadi seperti penyuluhan kepada masyarakat pada umumnya dan yang termasuk usia anak pada khususnya. Selain itu usaha preventif dapat dilakukan secara normatif dengan mengeluarkan peraturan hukum yang bermanfaat untuk mengatur secara ketat dan adil terkait perkawinan usia anak, hal ini dimaksudkan Hukum dapat menjadi “tool of social control”. Munculnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dimaksudkan untuk dapat melihat secara komprehensif dan tuntas mengenai akar permasalahan mengapa para pihak mengajukan Dispensasi Kawin mengingat potensi kemudharatan pada dua sisi sama besarnya dan patut untuk dipertimbangkan.

Seyogyanya, usaha untuk menghadirkan perlindungan yang berorientasi pada kepentingan anak tidak hanya berada pada institusi dan/atau lembaga negara namun juga masyarakat di mana sang anak tumbuh lebih penting untuk menciptakan paradigma dan budaya yang mementingkan kepentingan tumbuh kembang anak sebagai pemegang tampuk penerus generasi mendatang.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada beberapa daerah pesisir yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan seperti Sapa Timur, Boyong Pante, Tanamon, Ongkaw, Matani, Molinow dan Tumpaan. Peneliti mendeskripsikan lokasi penelitian dengan mengaitkan hal-hal penting dalam masalah pada penelitian ini.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif disusun deskripsi atas karakteristik sosial dan normatif, kemudian dilakukan analisis pada karakteristik pasangan di bawah umur dengan berbagai persoalannya dan faktor-faktor yang melingkupinya. Artinya, penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi. Penelitian kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai karakteristik masyarakat pesisir dalam upaya penyusunan program penanggulangannya.

Noeng Muhadjir mengatakan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang hanya sekedar menggambarkan hasil analisis suatu variabel penelitian.[[107]](#footnote-107) Sedangkan Imron Arifin mengatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian.[[108]](#footnote-108)

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.[[109]](#footnote-109) Pendekatan ini dimungkinkan mampu menjelaskan kondis sosial masyarakat perihal pernikahan dini dan juga mampu untuk menganalisis aturan pernikahan yang dikhususkan pada aturan usia nikah. Penelitian ini difokuskan pada, bagaimana efektifitas sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 16 tahun 2019 serta menunjukan solusi yang kongkrit dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan yang dilakukan selama 3 bulan terhitung setelah ujian proposal selesai. Penelitian ini difokuskan pada dua instansi pemerintah yakni Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) dan masayarakat muslim yang disesuaikan dengan alasan masalah ini diangkat.

## C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah asal subyek yang diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[[110]](#footnote-110) Sumber data dibagi peneliti atas dua yakni sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (tambahan).

Sumber data primer pada penelitian ini adalah berasal dari informan dengan latar belakang Kepala KUA, Penghulu, tokoh agama dan tokoh adat di Kabupaten Minahasa Selatan. Peneliti mencari pengakuan dari informan. Selain itu dalam mendaptkan hasil data yang lebih optimal, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait aktivitas, sosial masyarakat dan juga perilaku terkait masalah penelitian.

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berasal dari kepustakaan baik secara cetak dan juga onine seperti dokumen penting, buku, artikel-artikel penelitian yang berkaitan dengan pernikahan dini baik dari segi aturan undang-undang dan juga secara sosial di masyarakat.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang memiliki relevansi dengan tujuan penelitian dan berkaitan dengan efektifitas penulis dalam menjaring data-data yang dapat dideskripsikan. Beberapa teknik pengumpulan data melalui metode penelitian lapangan yang digunakan penulis meliputi:

1. Observasi

Penggunaan teknik obeservasi partisipasi dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan awal terhadap obyek yang menjadi sampel lokasi penelitian sehingga diperoleh data dan informasi yang bersifat umum. Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan serangkaian penelitian secara langsung di lapangan sehingga dapat diperoleh data primer dan sekunder serta informasi yang berkaitan secara langsung mengenai keadaan nyata dan aktual dari dinamika yang terjadi sehingga keakuratan proses penjaringan data-data melalui teknik ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan demikian pemahaman peneliti terhadap kondisi yang terjadi merupakan acuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.[[111]](#footnote-111)

Peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap objek dan subjek penelitian. peneliti mengamati secara langsung situasi dan keadaan sekitar informan, keadaan keluarga, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di lokasi penelitian.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilaksanakan melalui telepon.[[112]](#footnote-112)

Teknik wawancara dilakukan melalui serangkaian tahapan tanya jawab yang mendalam terhadap pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang ingin diungkap dalam penelitian ini dengan melibatkan sejumlah responden yang dianggap representatif untuk memperoleh data dan informasi yang mungkin belum sempat terjaring melalui metode lainnya. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan data dan informasi yang diperlukan sehingga dapat disajikan dalam bentuk data.

1. Dokumentasi

Melalui dokumentasi, peneliti berusaha menelusuri berbagai dokumen yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Kegiatan awal yang dilakukan peneliti yaitu menemui setiap informan kunci untuk memperoleh dokumen yang diperlukan untuk menunjang perolehan data penelitian. Informasi yang berupa dokumen dan catatan lainnya ini sesungguhnya cukup bermanfaat bagi data penelitian.

Dalam dokumentasi ini dilakukan juga penulusuran referensi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan menelusuri dan mempelajari berbagai referensi baik berupa buku, kamus, ensiklopedi, majalah, koran dan referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian mengutipnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Teknik penelusuran referensi ini sangat diperlukan dalam menemukan data-data yang masih berserakan di berbagai referensi yang ada untuk dijadikan data tambahan dalam memperkuat data dan hasil penelitian ini.

## E. Teknik Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data selanjutnya diinterpretasi sehingga memerlukan pengolahan dan analisa data. Upaya ini merupakan tindak lanjut di dalam menyajikan analisa terhadap data hasil penelitian. Interpretasi data penelitian memungkinkan penulis untuk menemukan solusi yang tepat yang secara ilmiah berkaitan dengan validitas hasil penelitian ini.[[113]](#footnote-113)

Tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data-data yang terkumpul dalam tahapan pengumpulan data menggunakan prosedur yang disarankan oleh Moleong yaitu:

* + - 1. Reduksi data. Peneliti melakukan proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Upaya peneliti mededuksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga data yang direduksi memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Pada tahap reduksi, peneliti melakukan proses koding atau pemberian kode pada jawaban-jawaban informan setelah diedit dengan tujuan untuk memudahkan pengerjaan analisis data.
      2. Penyajian Data. Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sedemikian sehingga data lebih mudah dipahami. Tanpa ada penyajian yang tepat, sorang peneliti akan kesulitan untuk menganalisis hasil akhir penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Pada langkah ini, peneliti menyajikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian singkat. Peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif deskriptif.
      3. Pengambilan kesimpulan di mana berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perlu diketahui bahwa Kabupaten Minahasa Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara oleh DPR RI. Namun kedua daerah pemekaran baru ini diresmikan pada tanggal 25 Februari 2003. Pusat pemerintahan dan sekaligus ibukota kabupaten Minahasa Selatan terletak di Amurang. Penduduk Minahasa Selatan pada tahun 2021 berjumlah 237.740 jiwa, dengan kepadatan 163,91 jiwa/km2.

Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan berasal dari kecamatan-kecamatan dari Kabupaten Minahasa yaitu Belang, Modoinding, Motoling, Ranoyapo, Ratahan, Sinonsayang, Tenga, Tareran, Tombasian, Tombatu, Tompaso Baru, Touluaan, dan Tumpaan. Pada tahun 2007, Kabupaten Minahasa Tenggara dibentuk atas hasil pemekaran Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007.

Menurut Sensus Penduduk 2010, mayoritas penduduk Kabupaten Minahasa Selatan beragama Kristen yakni 90,79%, dimana Protestan 87,83% dan Katolik 2,96%. Sedangkan pemeluk agama Islam juga cukup siginifikan, yakni 9,07% dimana hampir 30% diantaranya berada di kecamatan Sinonsayang. Pemeluk agama Konghucu 0,02%, Buddha 0,02%, dan Hindu 0,01% yang umumnya ada di kota Amurang.

**Tabel 3.** Deskripsi lokasi penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wilayah** | **Kecamatan** | **Deskripsi** |
| Sapa Timur | Kecamatan Tenga | Sapa Timur adalah salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, provinsi Sulawesi Utara. Dengan memiliki luar wilayah 3150 Ha, desa ini dihuni sekitar 2570 penduduk, Mayoritas masyarakat Desa Sapa memiliki mata pencaharian sebagai nelayan meskipun ada juga seabagi petani dan juga peternak. Hasil wawancara dan observasi menjelaskan bahwa hampir setengah penduduk Desa Sapa adalah masyarakat Muslim. |
| Boyong Pante | Kecamatan Sinonsayang | Boyong Pante merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. |
| Tanamon | Kecamatan Sinonsayang | Tanamon merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. |
| Ongkaw | Kecamatan Sinonsayang | Ongkaw merupakan merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. |
| Matani | Kecamatan Tumpaan | Matani merupakan merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. |
| Molinow | Kecamatan Tenga | Tumpaan merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Desa Wisata Molinow memiliki pemandangan alam pantai yang indah, memiliki tradisi kearifan lokal budaya seperti menjunjung nyiru, tradisi menangkap ikan, dan tari masamper dan kabasaran. |
| Tumpaan | Kecamatan Tumpaan | Tumpaan merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. |

## B. Hasil Penelitian

Pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan muncul karena berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang membuat orang tua memilih menikahkan anak mereka mulai dari faktor budaya, hamil dan merasa sudah mampu untuk menjalani rumah tangga.

Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara pada tokoh agama. Hasil yang didapatkan adalah hamil menjadi faktor utama terjadinya pernikahan di bawah umur. pengakuan dari tokoh agama adalah pergaulan anak-anak muda yang sulit dikontrol orang tua mereka menyebabkan anak mereka terjerumus pada perbuatan yang salah.

“Pengaruh IT (media sosial, tontonan yang tidak baik) ditambah pergaulan berdampak pada kecelakan yang sering kita lihat sekarang yakni hamil di luar nikah dan hal ini membuat dari orang tua dan juga kami dari KUA merasa serba salah, di sisi lain mengikuti aturan karena harus mencapai umur 19 tahun namun di sisi lain si anak sudah hamil dan butuh tanggung jawab dari laki-laki.”[[114]](#footnote-114)

“Yang menyebabkan nikah di bawah umur ini terjadi yakni pergaulan bebas. Di Tanamon itu sendri pergaulannya sudah mengarah ke arah negatif. Selain itu orang tua tidak memberikan batasan kepada anak mereka. Misal dalam penggunaan media sosial atau alat digital yang tidak di kontrol oleh orang tua itu sendri yang mengakibatkan pergaulan bebas itu sendiri. Pergaulan bebas yang terjadi inilah sampai pada titik si perempuan tersebut hamil yang selanjutnya dari keluarga perempuan meminta dispensasi nikah di PA.”[[115]](#footnote-115)

Sulitnya orang tua mengontrol anak mereka karena kesibukan untuk mencari nafkah. Peneliti melakukan observasi dan menemukan bahwa setiap pagi orang tua (bapak) sibuk pergi ke laut dan berdagang (ibu). Selanjutnya pada wawancara dengan informan menjelaskan sulitnya mendapatkan waktu luang dengan anak mereka karena di satu sisi orang tua merasa lelah karena bekerja di pagi hari dan anak mereka melakukan aktivitas di malam hari juga.

“Yang menyebabkan nikah di bawah umur ini terjadi yakni pergaulan bebas. Di Tanamon itu sendiri pergaulannya sudah mengarah ke arah negatif. Selain itu orang tua tidak memberikan batasan kepada anak mereka. Misal dalam penggunaan media sosial atau alat digital yang tidak di kontrol oleh orang tua itu sendri yang mengakibatkan pergaulan bebas itu sendiri. Pergaulan bebas yang terjadi inilah sampai pada titik si perempuan tersebut hamil yang selanjutnya dari keluarga perempuan meminta dispensasi nikah di PA. Namun dari PA juga tidak langsung memberikan dispensasi nikah tersebut dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Faktor terbesar pasangan yang menikah di bawah umur selama 3 tahun terakhir adalah karena hamil yang dibuktikan dengan bukti dispensasi nikah dari PA.”[[116]](#footnote-116)

“Namun ada juga yang menikah dibawah umur karena telah hamil dan itu banyak. Ada yang menikah di bawah usia duluan sebelum mendaftar ke KUA, setelah mencapai usia telah mencapai 19 tahun akan mendaftar ke KUA.”[[117]](#footnote-117)

Selain hamil, pernikahan di bawah umur juga terjadi disebabkan kebiasaan masyarakat pesisir yang telah menjadi tradisi yakni sesegera mungkin menikahkan anak mereka. Bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Minahasa Selatan, selama perempuan telah mengalami menstruasi anak laki-laki telah mengalami mimpi basah, maka anak tersebut sudah bisa dinikahkan.

“Masyarakat kebanyakan menjodohkan anak mereka ketika masih mudah namun bagi mereka sudah siap menikah.”[[118]](#footnote-118)

“Jika sudah memasuki usia baliqh dan dilamar oleh keluarga, maka pantang keluarga untuk menolak keluarga tersebut, itu tradisinya. masyarakat menganggap jika menolak lamaran tersebut si anak perempuan ini jauh dari jodohnya.”[[119]](#footnote-119)

Kebiasaan masyarakat pesisir khususnya muslim adalah meyakini bahwa di dalam kitab suci Al-Quran membolehkan hal tersebut juga tidak tercantum umur minimal untuk menikah, serta adanya pandangan bahwa seorang anak gadis yang tidak menikah sampai pada usia 16 tahun maka disebut perawan tua. Orang tua yang memiliki anak remaja perempuan bertindak sebagai pengambil keputusan utama dalam hal pernikahan anak, sehingga merasa tidak perlu untuk meminta persetujuan anak saat akan menikahkan anak.

Permasalahan yang ditemukan peneliti tidak terlepas dari sosok tokoh agama dan tokoh adat merupakan yang paling dibutuhkan. Bagi tokoh agama, sosialisasi terus dilakukan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat terkait nikah di bawah umur ini.

“Di Sapa ada 13 yang menikah di bawah umur. Di sini sudah di jelaskan kepada masyarakat jika menikah di bawah umur harus melalui Pengadilan Agama dulu. Jika Pengadilan Agama telah memberikan dispensasi nikah, maka kami menerima pernikahan tersebut maksudnya kami akan membantu proses pernikahan tersebut dan mengijinkannya.”[[120]](#footnote-120)

“Penerapan batas usia nikah, tidak jadi masalah. Karena sosialisasi dari KUA dilakukan oleh keimaman 3 bulan sekali. Bahkan, kasus Pernikahan di bawah umur di Molinow berkurang.”[[121]](#footnote-121)

Tokoh agama seperti imam mesjid tidak akan menikahkan pasangan di bawah umur jika tidak mendapatkan izin dari PA. Hal tersebut diakui para tokoh agama semenjak aturan ini berlaki. Bahkan, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat dan mendapatkan bahwa di daerah pesisir seperti Tanamon masih menerapkan adat terkait dengan pernikahan di bawah umur ini. Setiap pasangan yang ingin menikah harus meminta izin terlebih dahulu kepada tokoh agama. Di sinilah tokoh agama melihat salah satu persyaratan menikah yakni umur pasangan sesuai dengan arahan KUA dan UU No. 16 Tahun 2019. Jika tidak memenuhi persyaratan umur. Maka tokoh adat akan langsung menolak pernikahan tersebut.

**Tabel. 4.** Jumlah pernikahan di KUA Kabupaten Minahasa Selatan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah |
| KUA Tenga | 61 | 50 | 76 | 194 |
| KUA Tombasian | 51 | 70 | 72 | 193 |

Sumber: Dokumentasi KUA Tenga dan KUA Tombasian

**Tabel. 5.** Jumlah pernikahan di bawah umur di KUA Kabupaten Minahasa Selatan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah |
| KUA Tenga | 5 | 6 | 12 | 23 |
| KUA Tombasian | 3 | 2 | 5 | 10 |

Sumber: Dokumentasi KUA Tenga dan KUA Tombasian

Angka berdasarkan data yang masuk di KUA masing-masing. Meskipun terdapat perbedaan data antara Pengadilan Agama (23 pada tahun 2021) dan KUA di Minahasa Selatan, dikarenakan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tidak selamanya menikah di KUA. Disamping itu, ada juga kasus yang terjadi di mana masyarakat telah menikahkan terlebih dahulu anak mereka yang belum cukup umur secara hukum. Masyarakat mendaftarkan anak mereka di KUA setelah merasa umur cukup 19 tahun sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang.

“Ada istilah tabrak aturan, yakni memaksakan pernikahan di bawah umur tanpa adanya dispensasi nikah dari PA. Hal seperti terjadi karena perempuan telah hamil.”[[122]](#footnote-122)

“Tetap pernikahan dibawah umur terjadi, karena masyarakat masih bisa mengajukan isbath nikah di PA ditambah pergaulan anak muda yang berakibat hamil diluar nikah membuat PA memberikan dispensasi nikah dan KUA mencatat pernikahan tersebut. Persoalan legalitas (pembuatan akta lahir anak atau KK) ini membuat masyarakat mengajukan isbath di PA.”[[123]](#footnote-123)

“Fenomena yang terjadi di masyarakat ini (nikah sirih karena di bawah umur lalu mengajukan isbath nikah) merepotkan dan menyulitkan masyarakat 2 kali.”[[124]](#footnote-124)

Tokoh agama terkait masalah tersebut tidak memaksakan pasangan untuk tidak menikah di bawah umur. Bagi mereka selama hal tersebut disetujui oleh dua pihak keluarga dan juga kedua pasangan. Hal inilah yang menjadi yang menjadi titik permasalahan yang harus di selesaikan KUA.

“Masalah nikah di bawah umur ini, ketika pasangan/orang tua datang dengan maksud ingin menikah, kami dari KUA menolak karena masih belum cukup 19 tahun. Kemudian, dari pasangan/orang tua tersebut datang ke PA untuk mengajukan dispensasi nikah. Untuk diterima atau ditolaknya dispensasi nikah tersebut tergantung bagaimana hakim menilai, kami sebagai KUA hanya mencatat dan memeriksa apakah pasangan yang ingin menikah sudah sesuai syarat yang ditentukan atau tidak.”[[125]](#footnote-125)

Peneliti juga melihat realita kehidupan pasangan yang menikah di bawah umur, di mana kedua pasangan masih bergantung kepada orang tuanya. Berdasarkan wawancara, kebanyakan pasangan masih tinggal dengan orang tua karena membutuhkan uluran tangan mereka dalam mendukung ekonomi mereka, namun ada juga sebagai bentuk untuk membimbing mereka menjadi keluarga yang harmonis.

“Kebanyakan pasangan yang telah menikah muda masih tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang ini. Tergantung dengan ekonomi mereka dan rata-rata ekonomi mereka rendah. Selain ekonomi mereka juga tetap memerlukan bimbingan orang tua untuk keberlangsungan keluarga mereka.”[[126]](#footnote-126)

“Alhamdulillah ada yg bisa menyesuaikan hidup mandiri tp ada juga yang tetap masih menjadi tanggung jawab orang tua.”[[127]](#footnote-127)

Selain itu, terdapat juga permasalahan utama pasangan di bawah umur. Pasangan di bawah umur tidak bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik karena emosi yang sulit dikontrol oleh keduanya. Selain emosi, masalah ekonomi yang tidak stabil serta pengetahuan tentang pernikahan yang tidak memumpuni para pasangan di bawah umur membawa mereka kepada masalah yang tidak bisa diselesaikan kecuali bercerai.

## C. Pembahasan

### Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 pada Masyarakat Pesisir

Mengubah UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan pada Pasal 7. Dari sudut pandang legislator, diharapkan pengaturan usia perkawinan yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas pernikahan. Hal ini terutama berlaku untuk kualitas rumah dan pencegahan pernikahan di bawah umur. Menaikkan usia pernikahan juga diharapkan berdampak memberikan kesempatan calon pengantin untuk bertindak lebih dewasa. Dan karena tingkat pendidikan minimal setingkat Abitur/SMA adalah 19 tahun untuk memudahkan mencari pekerjaan, perubahan usia ini sebenarnya tidak terlalu efektif, malah menjadikannya pilihan yang luar biasa di antara banyak perguruan tinggi dan universitas. kasus semakin meningkat. Serahkan berkas ke pengadilan. Sama seperti batasan usia ini tidak benar-benar berfungsi di masyarakat. Manfaat perubahan positif pada usia 19 tahun dari segi kualitas sistem reproduksi dari segi kesehatan dan kejiwaan dibandingkan dengan usia 16 tahun lebih tinggi dari segi bekal formal bagi rumah tangga yang sudah berijazah. akan menjadi nilai tambah. dan usia 16 tahun juga mentalnya labil karena kemungkinan hamil di luar nikah. Karena melanggar agama berdampak buruk yaitu hamil di luar nikah, dan dalam hukum perkawinan nikah siri adalah haram hukumnya jika melanggar ketentuan hukum formil. Menurut KHI, anak yang lahir di luar perkawinan suci/sah bukanlah anak haram. Hal ini karena anak yang sah merupakan hasil perkawinan yang sah. Atau dapat dibuktikan secara ilmiah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pasal 43.

Upaya pencegahan di dalam negeri dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Pendewasaan Usia Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dengan syarat menikah 16 tahun untuk wanita dan 19 untuk pria, dan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan memperketat usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan dilatarbelakangi oleh hasil-hasil penelitian terdahulu dan stigma negatif dari masyarakat mengenai dampak buruk dari perkawinan di bawah umur.[[128]](#footnote-128) Tindakan pemerintah mengetuk palu perubahan itu merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan anak dan perempuan.[[129]](#footnote-129) Pada aturan pembatasan usia nikah ini juga diberikan pengecualian jika usia pasangan belum mencapai usia 19 tahun yakni pada pasal 7 (2) yang intinya adalah bisa mengajukan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin ini perlu dimaksimalkan dengan mengutamakan asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini ditekankan dengan bukti masyarakat yang akurat. Aturan yang menjelaskan proses Dispensasi Kawin di PA yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, namun belum sepenuhnya diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia. aturan ini menetapkan konsep dasar hukum acara (pemeriksaan permohonan dispensasi nikah) yang tidak pernah ditetapkan sebelumnya. Ada dua hal pokok yang menjadi dasar substansi pada aturan ini, *pertama,* secara formiil dapat mendorong pemeriksaan perkara dispensasi nikah dengan hakim tunggal. *Kedua,* pemeriksaan dispensasi nikah dilakukan secara komprehensip dengan memperhatikan berbagai faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon pasangan suami istri mulai dari kesehatan, ekonomi sosial dan budaya bahkan hal yang lain seperti pemaksaan.

Namun, Peneliti juga melihat terdapat perbedaan persepsi penerimaan baik masyarakat dan lembaga pelaksana perkawinan terhadap Undang-undang No. 16 tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menemukan beberapa pola aktivitas masyarakat mengenai usia pernikahan sehingga terjadi pernikahan dini. *Pertama,* pernikahan dini terjadi karena pergaulan remaja yang semakin sulit dikontrol. Pergulan anak ini mengarah ke perzinahan bahkan menyebabkan anak perempuan hamil. Mulai dari sini, baik perzinahan dan hamil diluar nikah menjadi aib keluarga, sehingga orang tua baik dari pihak laki-laki dan juga perempuan harus menikahkan keduanya.

*Kedua*, pernikahan dini terjadi karena orang tua masih memandang kebolehan menikah dari ajaran agama Islam, artinya masyarakat belum memahami tujuan pembatasan usia yang baru. Pada hasil penelitian peneliti ditemukan bahwa meskipun KUA menolak pernikahan para pasangan ini karena batas usia tidak mencukupi, tetap semua itu dikembalikan kepada keputusan orang tua, dan orang tua menganggap secara agama yang mereka yakini adalah sah, sehingga mengambil jalur nikah secara siri.

*Ketiga*, masih ada kebiasaan/kultur kepercayaan masyarakat khususnya terhadap penolakan atas lamaran yang datang. Kepercayaan ini membuat masyarakat harus menerima lamaran orang tersebut meskipun anak mereka meskipun anak tersebut masih bisa dikatakan belum siap untuk menikah. Berdasarkan kepercayaan dari kultur masarakat ini, jika tidak terima lamaran tersebut bisa berdampak kepada anak mereka yang tidak bisa menikah sama sekali. hal ini juga barengi oleh faktor sosial dimana akan muncul rasa malu dari omongan tetangga karena menolak lamaran yang dianggap sebagai rejeki.

Pola-pola yang ditemukan tersebut membuat dari persepsi masyarakat ini membuat undang-undang perkawinan ini belum bisa dikatakan efektif. Pola-pola ini juga didukung dengan faktor ekonomi keluarga agar orang tua akan melepas tanggungjawab secara ekonomi terhadap kebutuhan finansial anak mereka.

Selain masalah persepsi masyarakat, peneliti juga melihat masalah lain yakni perihal regulasi. Definisi dewasa menurut Undang-undang perkawinan tidak relevan dengan KUHPerdata yakni 21 tahun. Selain itu berbeda pula dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu 17 tahun dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu 18 tahun. Pada kajian filosofis undang-undang perkawinan ini, kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang sangat penting karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga dan 19 tahun adalah usia idealnya.[[130]](#footnote-130) Namun meskipun begitu apa yang dilihat para praktisi hukum Islam seperti KUA tidak sepenuhnya dikatakan ideal. Berdasarkan wawancara dengan beberapa kepala KUA, usia 19 tahun masih belum bisa dikatakan mencapai kematangan baik secara emosional dan juga secara ekonomi. Sehingga banyak kasus yang muncul terjadi kekerasan dan perselisihan para pasangan muda yang masih berusia 19-21 tahun dikarenakan emosi dan ekonomi yang terganggu.

Hasil data wawancara yang disimpulkan peneliti adalah keseluruhan masyarakat tidak mengetahui tentang telah diterapkan peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut selain itu dokrin agama tentang batasan usia menikah yakni baligh telah melekat kepada diri masyarakat Muslim. Namun, untuk selanjutnya mereka tetap akan berusaha mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, akan tetapi sangat disayangkan jika adanya peraturan terbaru namun kurangnya perhatian pemerintah pada masyarakat khususnya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Menurut tokoh agama perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku sekarang ini tanpa adanya alasan dan mengaku dengan tegas pengaturan tersebut telah diusahakan untuk disosialisakan kepada masyarakat.

Banyak hal menjadi persoalan yang harus dicegah oleh pemerintah sebagai pembuat dan juga pelaksana undang-undang. Peneliti memikirkan bahwa harus ada sinkronisasi perihal dewasa menurut undang-undang yang memiliki perbedaan usia dalam melaksanakan hukum sehingga menjadi seragam. Sinkronisasi undang-undang terhadap batas usia baik sangat penting apalagi berkaitan dengan HAM dan juga KUHPerdata, sehingga penerimaan di masyarakat dapat dilakukan secara masif.

Pernikahan di bawah umur membawa dampak kepada kedua pasangan itu sendiri:

1. Pernikahan di bawah umur membuat pasangan lebih sering bertengkar karena tidak bisa mengontrol emosi.

2. Pernikahan di bawah umur dapat menjadi kemudharatan jika tidak disertai dengan pengetahuan tentang pernikahan itu sendiri.

Peran orang tua menjadi hal yang utama. Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak, karena keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua.

### Sikap Masyarakat Pesisir terhadap UU No. 16 Tahun 2019

Batas usia perkawinan di Indonesia berbeda jika dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih standar dengan negara-negara lain. Batas usia perkawinan di Pakistan adalah 16 tahun perempuan dan 18 tahun laki-laki[[131]](#footnote-131) sama halnya dengan Malaysia[[132]](#footnote-132) namun sedikit berbeda dengan Brunei Darussalam yang menetapkan usia minimal perkawinan adalah laki-laki adalah 18 dan perempuan 17 tahun.[[133]](#footnote-133) Ukraina membatasi usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan minimal 18 tahun. [[134]](#footnote-134) Berbeda dengan batas usia perkawinan di Indonesia, dimana satu sisi menetapkan pada batasan normal, sementara pada sisi lain terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.[[135]](#footnote-135) Perbedaan ini terjadi karena tuntutan yang berbeda dari masing-masing negara dan perkembangan sosial dan juga hukum di negara-negara tersebut.

Respon masyarakat pesisir ada yang mendukung dan juga menolak. Masyarakat yang mendukung melihat bahwa dengan menikah anak khususnya laki-laki dapat menunjukan sisi bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Dengan menikah anak laki-laki dengan sendirinya harus keluar dari rumah demi mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga sehingga anak dapat menjadi laki-laki dewasa dengan lebih cepat.

Masalah kedewasaan bagi masyarakat pesisir dalam rumah tangga dapat diatasi setelah menikah. Bagi mereka, pasangan dengan seiring waktu dapat memahami satu sama lain dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga. Akan tetapi peneliti melihat kebanyakan pasangan tidak bisa mengatasi masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka itu sendiri, akhirnya pasangat banyak yang bercerai karena ekonomi mereka yang didukung dengan percekcokan tiada henti.

Masyarakat pesisir di Minahasa Selatan telah mengetahui adanya undang-undang terbaru tentang perkawinan akan tetapi tidak mengetahui secara pasti tentang isi undang-undangnya. Adapun 2 persetujuan lainnya yang disertai dengan alasan harus mengikuti aturan pemerintah dan masa depan anak yang lebih baik. ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut harus dipatuhi akan tetapi beberapa masyarakat tidak mengetahui adanya undang-undang ini. Dengan demikian sangat jelas bahwa Undang-Undang No. 16 tahun 2019 adalah ketentuan yang harus dilaksanakan, walaupun undang-undang ini terkesan memaksakan dan menyulitkan masyarakat.

Masalah batas usia perkawinan menjadi perhatian masyarakat muslim Indonesia dan negara lain. Sangat penting dalam mempersiapkan sifat kedewasaan baik secara fisik dan hari/jiwa agar bisa terbangun keluarga yang bahagia.[[136]](#footnote-136) Hal tersebut tidak terlepas dari usia seseorang yang hendak melangsungkan suatu hubungan perkawinan. Kesadaran seperti ini harus ada bagi setiap masyarakat Muslim.

Hasil data wawancara yang disimpulkan peneliti adalah keseluruhan masyarakat tidak mengetahui tentang telah diterapkan peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut selain itu dokrin agama tentang batasan usia menikah yakni *baligh* telah melekat kepada diri masyarakat Muslim. Namun, untuk selanjutnya mereka tetap akan berusaha mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, akan tetapi sangat disayangkan jika adanya peraturan terbaru namun kurangnya perhatian pemerintah pada masyarakat khususnya dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Menurut tokoh agama perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku sekarang ini tanpa adanya alasan dan mengaku dengan tegas pengaturan tersebut telah diusahakan untuk disosialisakan kepada masyarakat.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut sangat dibutuhkan. Banyak masyarakat yang kurang menyadari adanya ketentuan dalam hukum ini. Responden dari para tokoh agama Islam di Sulawesi Utara menyatakan bahwa penerapan ketentuan dalam undang-undang tersebut memang harus tetap dijalankan, akan tetapi ada hal-hal yang urgen dalam ketentuan agama yang harus didahulukan. Berlakunya undang-undang yang baru ini terdapat kendala bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan sebelum Undang-Undang diterbitkan.[[137]](#footnote-137) Bagi pasangan yang telah terlebih dahulu melaksanakan perkawinan sebelum aturan ini diberlakukan sedangkan pasangan perempuannya belum mencukupi usia 19 tahun akan sangat direpotkan. Sebab mereka masih harus menunggu sampai cukup usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 untuk mendapatkan kelengkapan administrasi pasangan tersebut.[[138]](#footnote-138) Adapun pernikahan di bawah umur dapat dijalankan apabila mendapat ijin dari Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Dalam temuan Rahmawati dan Nuraeni bahwa pasal ini awalnya adalah menjadi pilihan terakhir untuk kemashlahatan perlahan berubah menjadi peluang untuk memberikan legalitas pada pernikahan di bawah umur.[[139]](#footnote-139)

Perkawinan dengan demikian dipahami sebagai ikatan yang diakui secara hukum dan sosial antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun”. Itu ditetapkan. (19 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan, mereka yang melanggar aspek-aspek penting dari hak asasi manusia.

Pandangan masyarakat dalam masalah perkawinan adalah mendahulukan ketentuan agama namun tidak mengesampingkan aturan Undang-undang yang ada, karena akan berkaitan erat dengan kelengkapan administrasi yaitu berupa data bagi pasangan yang menikah. Penerapan Undang-undang terbaru di KUA sudah diterapkan, akan tetapi masih banyak para masyarakat Sulawesi Utara yang kurang mengetahui tentang adanya penerapan Undang-undang tersebut. Dengan demikian penerapan terkait Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang dilakukan di Kecamatan Sulawesi Utara belum efektif.

Ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) terlah dijelaskan batar usia perkawinan yang legal secara hukum.[[140]](#footnote-140) Sosialiasi terkait Undang-undang harus ditingkatkan dan seharusnya para masyarakat juga harus sadar akan adanya hukum terbaru tentang batasan perkawinan tersebut. Maksudnya, apabila pada suatu dan hal lain perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 19 tahun untuk laki-laki juga perempuan, maka undang-undang tetap memberi jalan keluar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yakni dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pasangan. Filosofi pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah.[[141]](#footnote-141)* Maka, pembatasan usia perkawinan sangat penting sebagai modal awal dalam proses pembentukan rumah tangga.

Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur memaknai perkawinannya sebagai karunia Tuhan yang harus diterima atau sudah takdir dari-Nya sehingga harus diterima dengan lapang dada. Apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka diterima dengan lapang dada, walaupun ada di antara mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka pendam sendiri. Yang mereka harapkan dalam kehidupan rumah tangganya agar antara suami istri agar saling setia, ekonomi cukup, saling percaya, komunikasi yang terbuka, saling pengertian, saling menyayangi, dan saling menyadari kekurangan masing-masing-masing pasangan sehingga dapat menerima kekurangan masing-masing. Pada kenyataannya, yang dihadapi keluarga yang nikah di bawah umur antara lain ada kecenderungan belum matang secara fisik dan mental, dengan indikasi sering terjadi percekcokan dalam keluarga.

Minahasa Selatan telah mengubah persepsi masyarakat tentang pernikahan di bawah umur. Penting untuk dicatat bahwa perkawinan di bawah umur perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Masyarakat pesisir termasuk sebagian perempuan, mengakui bahwa pernikahan di bawah umur ternyata berdampak positif. Hal ini dapat dilihat dari dampak signifikan perkawinan anak itu sendiri terhadap perempuan dan anak-anaknya, termasuk kekerasan seksual, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta penyakit menular seksual. Perbuatan lain yang tergolong pelanggaran HAM adalah pernikahan dini merampas pendidikan anak, membatasi akses perempuan ke ranah ekonomi, dan pada akhirnya dapat berdampak buruk pada status perempuan. Ini adalah pemaparan kekerasan di dalam rumah. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. Prioritas pertama pendidikan adalah untuk anak, dan dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan hak anak atas pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan paradigma baru yang menghubungkan hukum dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

Keluarga berpenghasilan rendah juga dianggap berkontribusi terhadap pernikahan dini, namun tidak demikian di Semarang. Dengan kata lain, pernikahan dini bukan karena masalah ekonomi juga atau bertambahnya kekayaan. Namun, masalah ekonomi muncul setelah pengenalan pernikahan dini. Tidak mampu bekerja dan kurang mampu, lulusan masih bergantung pada penghasilan orang tua sehingga sulit untuk menambah penghasilan. Dari segi pendidikan, anak muda yang baru bersekolah sembilan tahun, atau paling lama 12 tahun, lebih cenderung menikah dini. Namun, pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap banyak hal seperti pembentukan keturunan dan masalah lapangan pekerjaan. Selain itu, kurangnya pengetahuan menyebabkan pola pikir yang sempit, keengganan untuk memikirkan masa depan, dan kecenderungan untuk jatuh ke dalam pragmatisme dan materialisme.

Terlihat jelas bahwa prevalensi pernikahan usia dini banyak terkait dengan masalah pengetahuan dan interaksi sosial di masyarakat. Dari segi pengetahuan, para pelaku pernikahan dini belum mengetahui dampak dari pernikahan dini, dan pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur usia pernikahan masih sangat minim. Pernikahan dini juga sering dianggap memalukan karena merupakan akibat dari pergaulan bebas. Tapi hasil lapangan juga menunjukkan hal itu. Ini mungkin karena kurangnya pengawasan anti-promiscuous oleh keluarga dan masyarakat. Beberapa situasi yang teridentifikasi di lingkungan pelaku menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima adanya pernikahan dini. Hal ini berdampak pada minimnya sanksi sosial dan dapat menimbulkan efek jera. Pendidikan orang tua, trauma, dan genetika juga memengaruhi angka pernikahan dini. Melihat jawaban narasumber tentang alasan pernikahan dini, kita bisa melihat bahwa masa lalu orang tua juga berperan. Beberapa responden merasa hamil di luar nikah dapat diterima karena kedua orang tua memiliki latar belakang yang sama dan frekuensi pernikahan dini tidak dapat dihindari. Meski jarang ditemukan, trauma keluarga juga berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan dini. Pelaku pernikahan di bawah umur biasanya mencari jalan keluar dengan berusaha semaksimal mungkin untuk tampil menarik.

Perlu disadari bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 didampingi dengan aturan lain yang harus disosialisasikan oleh pelaksana undang-undang. Alasan perubahan usia perkawinan terletak pada Perma No. 5 tahun 2019 yakni demi keberlangsungan pasangan tersebut. Hal ini peneliti tidak temukan pada pemahaman tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Artinya meskipun sosialisasi berjalan tapi sebatas penyampaian batas usia nikah sesuai aturan undang-undang yang membuat masyarakat memiliki interpretasi masing-masing tentang batas usia perkawinan. Terbitnya Perma No. 5 tahun 2019 sebagai bentuk penjelasan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Pada aturan itu dijelaskan persyaratan pasangan di bawah umur dan pedoman hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Aturan ini disusun dengan tujuan menerapkan asas keberlangsungan anak. Regulasi ini seharusnya dijelaskan juga kepada masyarakat bahkan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang tidak mengetahui regulasi ini.

Persoalan ketidakpahaman tentang undang-undang yang terbaru tentang batasan usia nikah yakni 19 tahun ditemukan relatif tinggi, karena rata-rata informasi dan sosialisasi tentang usia nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama terbilang sangat masif, baik ketika rapat dengan forkopimka, maupun diselipkan dalam acara-acara lain yang melibatkan penyuluh agama. Namun ada beberapa orang yang memang tidak mengikuti sehingga mereka masih menganggap bahwa usia nikah masih berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni masih 16 tahun bagi perempuan. Mereka tidak mengetahui bahwa aturan ada pasal yang diubah dalam Undang-undang tersebut yakni menjadi sama 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan dengan munculnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

Artinya, sosialisasi ternyata masih dibutuhkan masyarakat. Peneliti melihat KUA harusnya lebih aktif lagi dalam memberikan penyluhan terkait masalah ini. Permasalahan pernikahan di bawah umur masih menjadi isu utama KUA yang harus ditemukan solusi yang konkrit.

Dalam kehidupan sosial, semua cara pandang dan cara berpikir manusia terikat pada latar belakang sosiokultural, yang pada akhirnya membentuk kebiasaan dan seringkali berubah seiring waktu. Pada hakekatnya, segala bentuk praktik budaya dan sosial disebabkan oleh interaksi sosial yang sering dilakukan melalui sudut pandang individu dalam suatu kelompok sosial. Hubungan timbal balik ini membentuk sistem sosial budaya.[[142]](#footnote-142)

Perubahan yang terjadi dalam masyarakat tidak lagi dapat dengan mudah dipisahkan dari sistem sosial itu sendiri, sistem psikologis individu dan sistem budaya. Saat ini banyak sekali bentuk perubahan sosial budaya yang membawa manfaat dan kerugian bagi masyarakat, termasuk praktek pernikahan di bawah umur.[[143]](#footnote-143)

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Regulasi batas usia nikah sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2019 terlaksana dengan baik di kalangan masyarakat pesisir. Pihak KUA dan para tokoh agama menjalankan aturan tersebut dengan tidak menikahkan pasangan yang masih di bawah umur jika belum mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Namun pada beberapa kasus terdapat pernikahan di bawah umur yang tetap dilaksanakan namun secara siri dan menunggu cukupmur untuk mendaftar di Kantor Urusan Agama. Hal ini dikarenakan perempuan telah hamil. Pasangan pun yang menikah di bawah umur masih membutuhkan bantuan orang tua dari segi ekonomi dan juga pendidikan keluarga.
2. Pada dasarnya masyarakat pesisir menyambut regulasi ini dengan baik namun hanya memahami bahwa pernikahan hanya bisa jika pasangan keduanya sudah mencukupi usia 19 tahun. Masyarakat tidak memahami alasan dan tujuan dari dibentuknya regulasi tersebut. artinya terlihat kurangnya penyuluhuan atau penyuluhan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh sehingga masih banyak masyarakat khususnya masyarakat pesisir yang tidak memahami regulasi ini.

## B. Saran

Dalam penelitian ini saran yang dapat diberikan adalah:

1. KUA harus lebih aktif dan variatif lagi dalam memberikan sosialisasi/penyuluhan karena masalah nikah di bawah umur masih menjadi masalah inti di KUA.
2. Penguatan tokoh adat ternyata sangat diperlukan. Terbukti bahwa masih terdapat aturan adat di beberapa wilayah di mana masyarakat harus meminta izin terlebih dahulu kepada tokoh adat untuk menikah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fikih Wanita: Empat Mazhab*. Ahsan Publishing, 2017.

al-Khusyt, Muhammad Ustman. *Membangun Harmonisme Keluarga*. Qisthi Press, 2019.

Arfhan, Imron. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*. Malang: Kalimasada Press, 1996.

Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail al. *Shahih Al Bukhari*. Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media, 2021.

Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.

Fitriani, Rini, Siti Sahara, and others. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Deepublish, 2020.

Ghazaly, H Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.

Ginting, Bengkel. *Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut*. Jejak Pustaka, 2022.

Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga*. BPK Gunung Mulia, 1991.

Hisyam, Ciek Julyati. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.

Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2022.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penenlitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali.* Shaf, 2015.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.

Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi’i*. Nuansa Cendekia, 2019.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Satria, Arif. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, 2021.

Utami, Tiwi Nurjannati, and Erlinda Indrayani. *Komoditas Perikanan*. Universitas Brawijaya Press, 2018.

Wijayanto, Dian. *Buku Ajar Ekonomi Perikanan*. uwais inspirasi indonesia, 2021.

Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama, 2007.

**Jurnal**

Adam, Adiyana. “Dinamika Pernikahan Dini.” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 15–23.

Adillah, Siti Ummu, Moch Taufik, and Amin Purnawan. “Pendampingan Dan Pengembangan Potensi Anak Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Manggihan Kabupaten Semarang.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 01 (2022): 15–25.

Ahyani, Sri. “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 31–47.

Alimuddin, Hardiyanti. “Eksistensi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari’ah).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85–101.

Andriati, Syarifah Lisa Mutiara Sari, and Windha Wulandari. “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59-68.

Ariih, Ihya’ Tsimaar. “Studi Komparasi Batas Usia Perkawinan Antara Hukum Indonesia (UU 16 Tahun 2019 Perubahan UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Dan Hukum Sarawak.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.

Azwar, Tengku Keizerina Devi, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati. “Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 1–13.

Badan Pusat Statistik. “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.” *Badan Pusat Statistik*, 2020, 6–10.

Baharuddin, Hendrah, and Nila Sastrawati. “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021.

Baysak, Erensu, Neşe Yorguner, Güler Kandemir, Işık Akyollu Denizman, and Yıldız Akvardar. “Is Early Marriage Practice a Problem for Women Living in Istanbul? A Qualitative Study.” *Archives of Women’s Mental Health*, 2021. https://doi.org/10.1007/s00737-020-01067-3.

Black, Ann. “Marching to the Beat of a Different Drum: Royalty, Women, and Ideology in the Sultanate of Brunei Darussalam.” *Royal Studies Journal* 7, no. 2 (2020): 94–116.

BPS. “Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 Dan Sensus Penduduk 2010.” Badan Pusat Statistik, 2016.

———. “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.” Badan Pusat Statistik, 2020.

———. “Pernikahan Dini Di Sulawesi Utara Tahun 2018-2019.” BPS Sulut, 2019.

Buan, Trofimus, Lady Cindy Soewarlan, and Chaterina A Paulus. “Curahan Waktu Kerja Ibu Rumah Tangga Pedagang Pengecer Ikan Di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.” *Jurnal Bahari Papadak* 3, no. 1 (2022): 81–88.

Damayanti, Ira. “Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Siswi Kelas XI Di SMK Batik 2 Surakarta.” *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada*, 2012.

Erikson, Erik H. “Childhood and Society.(2e Éd. Révisée et Élargie).” New York, WW Norton and Company, 1950.

Fa’atin, Salmah. “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 434–60.

Fadhilah, N., and K. Rahmah. “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia.” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012): 49–61.

Falah, Muhammad Nur, Aufi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah. “Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (2020): 167–82.

Fatma, Yulia. “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019): 117–35.

Fatmawaty, Riryn. “Memahami Psikologi Remaja.” *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 2 (2017).

Fischer, Lucy Rose. “Marriage and Family Developmment.” JSTOR, 1989.

Fudhali, Akhmad Basyir. “Batas Usia Kawin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Persepektif Hukum Progresif.” Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021.

Gobel, Meity Van. “Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado.” *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021).

Górny, Agata, and Ewa K\kepi\’nska. “Mixed Marriages in Migration from the Ukraine to Poland.” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 30, no. 2 (2004): 353–72.

Hahn, Youjin, Asadul Islam, Kanti Nuzhat, Russell Smyth, and Hee-Seung Yang. “Education, Marriage, and Fertility: Long-Term Evidence from a Female Stipend Program in Bangladesh.” *Economic Development and Cultural Change* 66, no. 2 (2018): 383–415.

Hanifah, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.

Haris, Jasmianti Kartini. “Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 205–26.

Harlina, Yuni. “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Hukum Islam* 20 (2020): 219–38.

Haryadi, Z. “Kafa’ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Ijtihad Jurnal, Hukum Islam Dan Pranata Sosial. Vol* 33 (2019).

Hasan, Faradila. “Implementasi Perkawinan Anak Usia Dini Pada Kesejahteraan Keluarga Di Kota Manado.” IAIN Manado, 2020.

Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.

Ihdatul, Nur. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Perbandingan Mazhab*, 2020.

Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66.

Istrianty, Annisa, and Erwan Priambada. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung.” *Privat Law* 3, no. 2 (2016): 164410.

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22.

Julijanto, Muhammad. “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72.

Karyadi, Rahmad. “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2022, 9–23.

Lathifah, Itsnaatul. “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015).

Makka, Misbahul Munir, Rosdalina Bukido, and Faradila Hasan. “Questioning about Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage Dispensation in PA Kotamobagu.” *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 1, no. 2 (2020): 80–84.

Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah.” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13.

Matnuh, Harpani. “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016).

Maudina, Lina Dina. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan.” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 89–95.

McGavock, Tamara. “Here Waits the Bride? The Effect of Ethiopia’s Child Marriage Law.” *Journal of Development Economics* 149 (2021): 102580.

McGowan, Deirdre. “Governed by Marriage Law: An Irish Genealogy.” *Social & Legal Studies* 25, no. 3 (2016): 311–31.

Meliana, Tika. “Hubungan Kesabaran Dengan Pemaafan Dalam Pernikahan.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Mikasari, Neli Devita. “Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Penikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Tinjau Dari Sosiologi Hukum (Study Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun.” IAIN Ponorogo, 2021.

Mulyana, Mulyana. “Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Jawa Pesisiran: Kajian Wayang Pesisiran Dalam Perspektif Etnolinguistik.” *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal* 1, no. 2 (2022): 207–25.

Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2016): 64.

Muzaffar, Muhammad, Zahid Yaseen, and Aisha Ahmad. “Child Marriages in Pakistan: Causes and Consequences.” *Journal of Indian Studies* 4, no. 2 (2018): 195–207.

Muzaiyanah, Muzaiyanah, and Anies Shahita Aulia Arafah. “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah.” *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159–92.

Nahdiyanti, Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar. “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 150–67.

Nanda, Priya, Priya Das, and Nitin Datta. “Education, Sexuality, and Marriageability: Overlapping Tropes in the Lives of Adolescent Girls in Haryana, India.” *Journal of Adolescent Health* 70, no. 3 (2022): S28--S35.

Nasution, Hotmartua. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Niaz, Mohammad. “Can Child Marriage Law Change Attitudes and Behaviour? Experimental Evidence from an Information Intervention in Bangladesh.” *ECONSTOR*, 2020.

Ningrum, Wafa Suci. “Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda Atau Duda Di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2022.

Nur’afyani, Nur’afyani. “Peran Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu.” IAIN Palu, 2019.

Nurkholis, Nurkholis. “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 75–91.

Nurliana, Nurliana. “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49.

Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 4 (2020).

Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317.

Pratama, Bintang. “Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini.” *Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu*, 2014.

Purba, Fredrick Dermawan, Asteria Devy Kumalasari, Langgersari Elsari Novianti, Lenny Kendhawati, Afra Hafny Noer, and Retno Hanggarani Ninin. “Marriage and Quality of Life during COVID-19 Pandemic.” *Plos One* 16, no. 9 (2021): e0256643.

Rahiem, Maila D H. “COVID-19 and the Surge of Child Marriages: A Phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia.” *Child Abuse & Neglect* 118 (2021): 105168. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168.

Rahmawati, Melinda, and Heni Ani Nuraeni. “Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 May (2021): 1–14.

Rahmawati, Sri. “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110.

Ramelan, Rafida. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Dispensasi Kawin: Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Rifiani, D. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2011): 125–34.

Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto. “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali).” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 82–96.

Rusdi, M Ali. “Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut’ah).” *Al-’Adl* 9, no. 1 (2016): 37–56.

Sabarisman, Muslim. “Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir.” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 3, no. 3 (2017).

Sahrudin, Taufik Hidayat. “Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif).” UIN SMH BANTEN, 2021.

Samad, Muhammad Yunus. “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017).

Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45.

Septarini, Rafiah, and Ummi Salami. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan.” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2019): 51–68.

Setiawan, Halim. “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74.

Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2016).

Shufiyah, Fauziatu. “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya.” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70.

Sinaga, M Harwansyah Putra, Nellareta Pratiwi, and Ika Purnama Sari. *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*. Elex Media Komputindo, 2021.

Siregar, A. N. “Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita.” *Egalita* 15, no. 2 (2020).

Sitorus, Iwan Romadhan. “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah.” *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 190–99.

Sumbulah, U., and F. Jannah. “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender).” *Egalita* 7, no. 2 (2012): 83–101.

Suparno, Suparno. “Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 134–51.

Susanto, Valeriel Margarettha. “Efektifiras Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974.(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” 2021.

SYALIS, ELPRIDA RIYANNY, and Nunung Nurwati Nurwati. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja.” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2020. https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192.

Syatori, A. “EKOLOGI POLITIK MASYARAKAT PESISIR CIREBON; Sketsa Dari Desa Citemu Kecamatan Mundu.” *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2018).

Syukron, Septiawan. “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah.” IAIN Purwokerto, 2020.

Tamboto, Henry J D, and Allen A Ch Manongko. “Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi Dan Modal Sosial.” Makaria Waya, 2019.

Telaumbanua, Dalinama. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan,” 2019.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik, Zainul Fuad, and Nurhayati Nurhayati. “The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 20, no. 1 (2022).

Usman, Moh. “Polemik Batas Usia Minimal 21 Tahun Dalam Melakukan Hibah.” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 205–17.

Utami, D. P., and Finza Khasif Ghifarani. “Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views.” *Al-’`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 185–205.

Vora, Vishal. “The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law Of England And Wales On Religious Marriage And Non-Marriage In The United Kingdom.” *Journal Of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020): 148–62.

Wahyuni, Alifia. “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I.” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85.

Watiningrum, Angggun Risdiana. “Tradisi Ruwah Rasul Pada Perkawinan Di Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Studi Analisa Hukum Islam).” IAIN Kediri, 2020.

Wijaya, Himawan Tatura, and Erwin Jusuf Thaib. “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato.” *AS-SYAMS* 1, no. 1 (2020): 30–46.

Yasrizal, Yasrizal. “Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Melalui Pengelolaan Dan Pengembangan Hasil Perikanan Di Meulaboh Provinsi Aceh.” *Jurnal Marine Kreatif* 2, no. 2 (2020).

Yumarni, Ani, and Endeh Suhartini. “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor).” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211.

Zulfiani, Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 211–22.

**Wawancara**

Wawancara dengan Imam Tumpaan, 5 Maret 2023

Wawancara Imam Ongkaw, 6 Maret 2023

Wawancara dengan KUA Sinonsayang, 5 Maret 2023

Wawancara Imam Sapa, Minsel, 2 Maret 2023

Wawancara dengan Imam Molinow, 12 Maret 2023

Wawancara Imam Boyong Pante, 5 Maret 2023

Wawancara Imam Sapa, 5 Maret 2023

Wawancara KUA Tombasian, Amurang, 6 Maret 2023

Wawancara Imam Bajo, 5 Mei 2023

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

















\







1. Annisa Istrianty and Erwan Priambada, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,” *Privat Law* 3, no. 2 (2016): 164410. [↑](#footnote-ref-1)
2. Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016); Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zulfiani Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 211–22. [↑](#footnote-ref-3)
4. Badan Pusat Statistik, “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda,” *Badan Pusat Statistik*, 2020, 6–10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Hendrah Baharuddin and Nila Sastrawati, “Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021; Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66. [↑](#footnote-ref-5)
6. Meity Van Gobel, “Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado,” *I’tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1 (2021); Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” [↑](#footnote-ref-6)
7. Rafida Ramelan, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Dispensasi Kawin: Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). [↑](#footnote-ref-7)
8. Siti Ummu Adillah, Moch Taufik, and Amin Purnawan, “Pendampingan Dan Pengembangan Potensi Anak Dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Manggihan Kabupaten Semarang,” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 01 (2022): 15–25; Dalinama Telaumbanua, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan,” 2019. [↑](#footnote-ref-8)
9. Faradila Hasan, “Implementasi Perkawinan Anak Usia Dini Pada Kesejahteraan Keluarga Di Kota Manado” (IAIN Manado, 2020). [↑](#footnote-ref-9)
10. BPS, “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda,” Badan Pusat Statistik, 2020.. [↑](#footnote-ref-10)
11. BPS, “Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 Dan Sensus Penduduk 2010,” Badan Pusat Statistik, 2016. [↑](#footnote-ref-11)
12. BPS. [↑](#footnote-ref-12)
13. BPS, “Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.” [↑](#footnote-ref-13)
14. BPS, “Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 Dan Sensus Penduduk 2010.”. [↑](#footnote-ref-14)
15. BPS, “Pernikahan Dini Di Sulawesi Utara Tahun 2018-2019,” BPS Sulut, 2019. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rahmad Karyadi, “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2022, 9–23. [↑](#footnote-ref-16)
17. Septiawan Syukron, “Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maslahah” (IAIN Purwokerto, 2020). [↑](#footnote-ref-17)
18. Alifia Wahyuni, “Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi’I,” *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 1 (2020): 62–85. [↑](#footnote-ref-18)
19. Nurkholis Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 75–91. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ihya’ Tsimaar Ariih, “Studi Komparasi Batas Usia Perkawinan Antara Hukum Indonesia (UU 16 Tahun 2019 Perubahan UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Dan Hukum Sarawak” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022). [↑](#footnote-ref-20)
21. Valeriel Margarettha Susanto, “Efektifiras Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Uu No. 1 Tahun 1974.(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” 2021. [↑](#footnote-ref-21)
22. Taufik Hidayat Sahrudin, “Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Legalitas Perkawinan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)” (UIN SMH BANTEN, 2021). [↑](#footnote-ref-22)
23. Ramelan, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasinya Terhadap Dispensasi Kawin: Studi Atas Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta.” [↑](#footnote-ref-23)
24. Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” [↑](#footnote-ref-24)
25. Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah,” *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2020): 190–99. [↑](#footnote-ref-25)
26. Aulil Amri and Muhadi Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85–101. [↑](#footnote-ref-26)
27. Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317. [↑](#footnote-ref-27)
28. M Ali Rusdi, “Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut’ah),” *Al-’Adl* 9, no. 1 (2016): 37–56. [↑](#footnote-ref-28)
29. Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, vol. 1 (UMMPress, 2020). [↑](#footnote-ref-29)
30. Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). [↑](#footnote-ref-30)
31. Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i* (Nuansa Cendekia, 2019). [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita: Empat Mazhab* (Ahsan Publishing, 2017). [↑](#footnote-ref-32)
33. Lucy Rose Fischer, “Marriage and Family Developmment” (JSTOR, 1989). [↑](#footnote-ref-33)
34. Tika Meliana, “Hubungan Kesabaran Dengan Pemaafan Dalam Pernikahan” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018). [↑](#footnote-ref-34)
35. Sri Rahmawati, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif),” *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020): 85–110. [↑](#footnote-ref-35)
36. R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (PT. Intermasa, 2021). [↑](#footnote-ref-36)
37. Nurliana Nurliana, “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. [↑](#footnote-ref-37)
38. Cahyani, *Hukum Perkawinan*. [↑](#footnote-ref-38)
39. Angggun Risdiana Watiningrum, “Tradisi Ruwah Rasul Pada Perkawinan Di Dusun Jarakan Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk (Studi Analisa Hukum Islam)” (IAIN Kediri, 2020). [↑](#footnote-ref-39)
40. Rinwanto Rinwanto and Yudi Arianto, “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali),” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 82–96. [↑](#footnote-ref-40)
41. H A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019); H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019). [↑](#footnote-ref-41)
42. Itsnatul Lathifah, “Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Mazahib* 3, no. 1 (2015): 46. [↑](#footnote-ref-42)
43. Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali.* (Shaf, 2015). [↑](#footnote-ref-43)
44. Ghazaly, *Fiqh Munakahat*; Muhammad Yunus Samad, “Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam,” *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2017); Cahyani, *Hukum Perkawinan*. [↑](#footnote-ref-44)
45. Amri and Khalidi, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur.” [↑](#footnote-ref-45)
46. Rafiah Septarini and Ummi Salami, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan,” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 8, no. 1 (2019): 51–68; Tengku Keizerina Devi Azwar, Utary Maharany Barus, and Yefrizawati Yefrizawati, “Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 1 (2022): 1–13. [↑](#footnote-ref-46)
47. Septarini and Salami, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan.” [↑](#footnote-ref-47)
48. Suparno Suparno, “Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017,” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021): 134–51. [↑](#footnote-ref-48)
49. Z Haryadi, “Kafa’ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Ijtihad Jurnal, Hukum Islam Dan Pranata Sosial. Vol* 33 (2019). [↑](#footnote-ref-49)
50. Muhammad Ustman al-Khusyt, *Membangun Harmonisme Keluarga* (Qisthi Press, 2019); Rini Fitriani, Siti Sahara, and others, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Deepublish, 2020). [↑](#footnote-ref-50)
51. M Harwansyah Putra Sinaga, Nellareta Pratiwi, and Ika Purnama Sari, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami* (Elex Media Komputindo, 2021). [↑](#footnote-ref-51)
52. Nur’afyani Nur’afyani, “Peran Kantor Urusan Agama Dan Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Palu Timur Kota Palu” (IAIN Palu, 2019); Septarini and Salami, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan.” [↑](#footnote-ref-52)
53. Septarini and Salami, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan.” [↑](#footnote-ref-53)
54. Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” *Justisi* 7, no. 1 (2021): 1–13. [↑](#footnote-ref-54)
55. Yulia Fatma, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019): 117–35. [↑](#footnote-ref-55)
56. Halim Setiawan, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 59–74. [↑](#footnote-ref-56)
57. Setiawan. [↑](#footnote-ref-57)
58. Neli Devita Mikasari, “Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Penikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Tinjau Dari Sosiologi Hukum (Study Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun” (IAIN Ponorogo, 2021). [↑](#footnote-ref-58)
59. Riryn Fatmawaty, “Memahami Psikologi Remaja,” *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 6, no. 2 (2017). [↑](#footnote-ref-59)
60. Ira Damayanti, “Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Siswi Kelas XI Di SMK Batik 2 Surakarta,” *Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kusuma Husada*, 2012. [↑](#footnote-ref-60)
61. Erik H Erikson, “Childhood and Society.(2e Éd. Révisée et Élargie)” (New York, WW Norton and Company, 1950). [↑](#footnote-ref-61)
62. Singgih D Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja Dan Keluarga* (BPK Gunung Mulia, 1991). [↑](#footnote-ref-62)
63. D. Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2011): 125–34. [↑](#footnote-ref-63)
64. Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47–70. [↑](#footnote-ref-64)
65. Rifiani, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.” [↑](#footnote-ref-65)
66. Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan,” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15, no. 2 (2019): 89–95. [↑](#footnote-ref-66)
67. Muhammad Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini Dan Problematika Hukumnya,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2015): 62–72. [↑](#footnote-ref-67)
68. Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 8, no. 2 (2016): 64. [↑](#footnote-ref-68)
69. U. Sumbulah and F. Jannah, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender),” *Egalita* 7, no. 2 (2012): 83–101. [↑](#footnote-ref-69)
70. Bintang Pratama, “Perspektif Remaja Tentang Pernikahan Dini,” *Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Bengkulu: Universitas Bengkulu*, 2014. [↑](#footnote-ref-70)
71. Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, 1992), 438. [↑](#footnote-ref-71)
72. Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2021); Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2016). [↑](#footnote-ref-72)
73. N. Fadhilah and K. Rahmah, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2012): 49–61. [↑](#footnote-ref-73)
74. Adiyana Adam, “Dinamika Pernikahan Dini,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (2019): 15–23. [↑](#footnote-ref-74)
75. D. P. Utami and Finza Khasif Ghifarani, “Minimum Age Of Marriage In Indonesia Perspective Of Islamic Law, Positive Law And Medical Views,” *Al-’`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 185–205; A. N. Siregar, “Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita,” *Egalita* 15, no. 2 (2020). [↑](#footnote-ref-75)
76. Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 4 (2020). [↑](#footnote-ref-76)
77. Tamara McGavock, “Here Waits the Bride? The Effect of Ethiopia’s Child Marriage Law,” *Journal of Development Economics* 149 (2021): 102580; Mohammad Niaz, “Can Child Marriage Law Change Attitudes and Behaviour? Experimental Evidence from an Information Intervention in Bangladesh,” *ECONSTOR*, 2020; Deirdre McGowan, “Governed by Marriage Law: An Irish Genealogy,” *Social & Legal Studies* 25, no. 3 (2016): 311–31; Vishal Vora, “The Continuing Muslim Marriage Conundrum: The Law Of England And Wales On Religious Marriage And Non-Marriage In The United Kingdom,” *Journal Of Muslim Minority Affairs* 40, no. 1 (2020): 148–62. [↑](#footnote-ref-77)
78. Nur Ihdatul, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah,” *Perbandingan Mazhab*, 2020. [↑](#footnote-ref-78)
79. Salmah Fa’atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 434–60. [↑](#footnote-ref-79)
80. Erensu Baysak et al., “Is Early Marriage Practice a Problem for Women Living in Istanbul? A Qualitative Study,” *Archives of Women’s Mental Health*, 2021, https://doi.org/10.1007/s00737-020-01067-3. [↑](#footnote-ref-80)
81. ELPRIDA RIYANNY SYALIS and Nunung Nurwati Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2020, https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192. [↑](#footnote-ref-81)
82. Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37–45. [↑](#footnote-ref-82)
83. Youjin Hahn et al., “Education, Marriage, and Fertility: Long-Term Evidence from a Female Stipend Program in Bangladesh,” *Economic Development and Cultural Change* 66, no. 2 (2018): 383–415. [↑](#footnote-ref-83)
84. Priya Nanda, Priya Das, and Nitin Datta, “Education, Sexuality, and Marriageability: Overlapping Tropes in the Lives of Adolescent Girls in Haryana, India,” *Journal of Adolescent Health* 70, no. 3 (2022): S28--S35. [↑](#footnote-ref-84)
85. Fredrick Dermawan Purba et al., “Marriage and Quality of Life during COVID-19 Pandemic,” *Plos One* 16, no. 9 (2021): e0256643. [↑](#footnote-ref-85)
86. Fa’atin, “Tinjauan Terhadap Batas Minimal Usia Nikah Dalam UU No. 1/1974 Dengan Multiprespektif.” [↑](#footnote-ref-86)
87. Syarifah Lisa Mutiara Sari Andriati and Windha Wulandari, “Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59-68. [↑](#footnote-ref-87)
88. Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019). [↑](#footnote-ref-88)
89. Nahdiyanti Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, and Nurul Qamar, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 1 (2021): 150–67. [↑](#footnote-ref-89)
90. Muhammad Nur Falah, Aufi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah, “Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (2020): 167–82. [↑](#footnote-ref-90)
91. Akhmad Basyir Fudhali, “Batas Usia Kawin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Persepektif Hukum Progresif” (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021). [↑](#footnote-ref-91)
92. Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015). [↑](#footnote-ref-92)
93. Tiwi Nurjannati Utami and Erlinda Indrayani, *Komoditas Perikanan* (Universitas Brawijaya Press, 2018). [↑](#footnote-ref-93)
94. Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. [↑](#footnote-ref-94)
95. Trofimus Buan, Lady Cindy Soewarlan, and Chaterina A Paulus, “Curahan Waktu Kerja Ibu Rumah Tangga Pedagang Pengecer Ikan Di Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Bahari Papadak* 3, no. 1 (2022): 81–88. [↑](#footnote-ref-95)
96. Dian Wijayanto, *Buku Ajar Ekonomi Perikanan* (uwais inspirasi indonesia, 2021); Utami and Indrayani, *Komoditas Perikanan*. [↑](#footnote-ref-96)
97. Mulyana Mulyana, “Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Jawa Pesisiran: Kajian Wayang Pesisiran Dalam Perspektif Etnolinguistik,” *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal* 1, no. 2 (2022): 207–25. [↑](#footnote-ref-97)
98. Muslim Sabarisman, “Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir,” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 3, no. 3 (2017); Yasrizal Yasrizal, “Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Melalui Pengelolaan Dan Pengembangan Hasil Perikanan Di Meulaboh Provinsi Aceh,” *Jurnal Marine Kreatif* 2, no. 2 (2020). [↑](#footnote-ref-98)
99. Henry J D Tamboto and Allen A Ch Manongko, “Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir Berbasis Literasi Ekonomi Dan Modal Sosial” (Makaria Waya, 2019); Bengkel Ginting, *Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut* (Jejak Pustaka, 2022); A Syatori, “EKOLOGI POLITIK MASYARAKAT PESISIR CIREBON; Sketsa Dari Desa Citemu Kecamatan Mundu,” *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2018). [↑](#footnote-ref-99)
100. Jasmianti Kartini Haris, “Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 205–26; Moh Usman, “Polemik Batas Usia Minimal 21 Tahun Dalam Melakukan Hibah,” *Al-’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 205–17. [↑](#footnote-ref-100)
101. Wafa Suci Ningrum, “Analisis Yuridis Terhadap Problematika Dispensasi Kawin Bagi Janda Atau Duda Di Bawah Umur Sebagai Prasyarat Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2022); Haris, “Implementasi Dispensasi Nikah Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Takalar.” [↑](#footnote-ref-101)
102. Sinaga, Pratiwi, and Sari, *Buku Saku (Wajib) Persiapan Pernikahan Islami*. [↑](#footnote-ref-102)
103. Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61. [↑](#footnote-ref-103)
104. Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–22. [↑](#footnote-ref-104)
105. Suparno, “Studi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Di KUA Kec. Keling Kab. Jepara Tahun 2016-2017”; Fitriani, Sahara, and others, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. [↑](#footnote-ref-105)
106. Muzaiyanah Muzaiyanah and Anies Shahita Aulia Arafah, “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah,” *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 1, no. 2 (2021): 159–92. [↑](#footnote-ref-106)
107. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998). [↑](#footnote-ref-107)
108. Imron Arfhan, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Malang: Kalimasada Press, 1996). [↑](#footnote-ref-108)
109. Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022). [↑](#footnote-ref-109)
110. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021). [↑](#footnote-ref-110)
111. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penenlitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2017). [↑](#footnote-ref-111)
112. S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). [↑](#footnote-ref-112)
113. Moleong, *Metodologi Penenlitian Kualitatif*. [↑](#footnote-ref-113)
114. Wawancara dengan Imam Tumpaan, 5 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-114)
115. Wawancara dengan Imam Tanamon, 5 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-115)
116. Wawancara dengan KUA Sinonsayang, 5 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-116)
117. Wawancara dengan Imam Tanamon, 5 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-117)
118. Wawancara Imam Ongkaw, 6 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-118)
119. Wawancara dengan KUA Sinonsayang, 5 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-119)
120. Wawancara Imam Sapa, Minsel, 2 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-120)
121. Wawancara dengan Imam Molinow, 12 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-121)
122. Wawancara Imam Boyong Pante, 5 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-122)
123. Wawancara Imam Sapa, 5 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-123)
124. Wawancara Imam Ongkaw, 5 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-124)
125. Wawancara KUA Tombasian, Amurang, 6 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-125)
126. Wawancara Imam Ongkaw, 5 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-126)
127. Wawancara Imam Bajo, 5 Mei 2023 [↑](#footnote-ref-127)
128. Hardiyanti Alimuddin, “Eksistensi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari’ah)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022). [↑](#footnote-ref-128)
129. Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 31–47. [↑](#footnote-ref-129)
130. Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Hukum Islam* 20 (2020): 219–38; Siregar, “Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita.” [↑](#footnote-ref-130)
131. Muhammad Muzaffar, Zahid Yaseen, and Aisha Ahmad, “Child Marriages in Pakistan: Causes and Consequences,” *Journal of Indian Studies* 4, no. 2 (2018): 195–207. [↑](#footnote-ref-131)
132. Agata Górny and Ewa K\kepi\’nska, “Mixed Marriages in Migration from the Ukraine to Poland,” *Journal of Ethnic and Migration Studies* 30, no. 2 (2004): 353–72. [↑](#footnote-ref-132)
133. Ann Black, “Marching to the Beat of a Different Drum: Royalty, Women, and Ideology in the Sultanate of Brunei Darussalam,” *Royal Studies Journal* 7, no. 2 (2020): 94–116. [↑](#footnote-ref-133)
134. Ibnu Radwan Siddik Turnip, Zainul Fuad, and Nurhayati Nurhayati, “The Current Development of Marriage Age Provisions in Indonesia and Malaysia: A Socio-Historical Approach,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 20, no. 1 (2022). [↑](#footnote-ref-134)
135. Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah.” [↑](#footnote-ref-135)
136. Maila D H Rahiem, “COVID-19 and the Surge of Child Marriages: A Phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia,” *Child Abuse & Neglect* 118 (2021): 105168, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105168. [↑](#footnote-ref-136)
137. Himawan Tatura Wijaya and Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Pohuwato,” *AS-SYAMS* 1, no. 1 (2020): 30–46. [↑](#footnote-ref-137)
138. Ani Yumarni and Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 193–211. [↑](#footnote-ref-138)
139. Melinda Rahmawati and Heni Ani Nuraeni, “Peran Dispensasi Kawin Dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 May (2021): 1–14. [↑](#footnote-ref-139)
140. Falah, Imaduddin, and Ilmiyah, “Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pemalang.” [↑](#footnote-ref-140)
141. Misbahul Munir Makka, Rosdalina Bukido, and Faradila Hasan, “Questioning about Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage Dispensation in PA Kotamobagu,” *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 1, no. 2 (2020): 80–84. [↑](#footnote-ref-141)
142. Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama, 2007). [↑](#footnote-ref-142)
143. Ciek Julyati Hisyam, *Sistem Sosial Budaya Indonesia* (Bumi Aksara, 2021). [↑](#footnote-ref-143)